



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KATA PENGANTAR

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Kebijakan akuntabilitas menegaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya harus dapat menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang sebenarnya secara jelas berdasarkan data yang tepat & akurat dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keberhasilan dan kegagalan setiap pimpinan instansi pemerintah dalam melaksanakan misi, tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya.

Laporan Akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2023. Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten tahun 2019-2023, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023 merupakan Laporan kinerja yang menyajikan perbandingan antara Capaian Kinerja (performance results) dengan Rencana Kerja (performance plan) dan informasi akuntabilitas kerja tahun 2023.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Dimana Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas;
2. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkualitas.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara telah mencapai target kinerja. Dari 4 indikator kinerja utama, 2 indikator dinyatakan “berhasil” yaitu dengan memenuhi capaian $\geq 100\%$ dari target yang telah ditetapkan, sedangkan 2 indikator (Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dan Pengamanan Aset) tidak memenuhi target yang dijanjikan hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala yang menyebabkan kurangnya pencapaian target pada indikator tersebut.

Berikut rincian capaian indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023:

Tabel 1.
Hasil Pencapaian Indikator Kinerja BPKPD Kabupaten Padang Lawas
Utara Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Masih dalam proses	0%
	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
	Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah	15.007.328.707	18.926.632.967	126%
2.	Pengamanan Aset	100%	75%	75%

Gunungtua, 13 Maret 2024

KEPALA BADAN PKPD



BANGUN PARLAUNGAN, SE, MM
PEMBINA
NIP. 19821201 200904 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Penjelasan Umum BPKPD.....	5
1.3 Permasalahan Utama.....	28
1.4 Dasar Hukum.....	29
1.5 Sistematika Laporan Kinerja.....	30
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	31
2.1 Tujuan dan Sasaran BPKPD	31
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023	34
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	67
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	69
3.1. Capaian Kinerja BPKPD.....	69
3.2. Realisasi Anggaran.....	78
BAB IV. PENUTUP	87
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bentuk perwujudan akuntabilitas publik atas keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan perlu disampaikan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah peran serta fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah.

Pada perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, capaian tujuan serta sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi wilayah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi, dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 PENJELASAN UMUM BPKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Bapak BANGUN PARLAUNGAN, S.E, M.M sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana dan bertanggung jawab kepada Bupati. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas dan kewajiban menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

- a. melaksanakan fungsi BUD;
- b. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. mengkoordinir penyusunan proyeksi keuangan daerah untuk pagu APBD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1 TUGAS DAN FUNGSI BPKPD

Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pendapatan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
 2. Sub Bidang Penetapan
- d. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB
 2. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB
- e. Bidang Anggaran, membawahi:
 1. Sub Bidang Anggaran 1
 2. Sub Bidang Anggaran 2
- f. Bidang Aset, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah
- g. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 1. Sub Bidang Verifikasi
 2. Sub Bidang Pencairan Dana
- h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pembinaan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah
 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional
- j. Kelompok Jabatan Pelaksana

Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah. Kepala Badan mempunyai Fungsi :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. melaksanakan fungsi BUD;
- c. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- e. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- f. mengkoordinir penyusunan proyeksi keuangan daerah untuk pagu APBD;
- dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas kelancaran pelaksanaan fungsi kepala Badan dalam bidang penyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, kepegawaian, rumah tangga dan teknis penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok Badan. Sekretaris Badan mempunyai Fungsi :

- a. memimpin sekretariat dalam pelaksanaan kegiatan teknis administrasi umum, perlengkapan dan peralatan, penataan arsip, kepegawaian dan penata usahaan keuangan serta penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan tugas fungsi Satuan Kerja;

- b. menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan teknis administrasi umum, perlengkapan dan peralatan, penataan arsip, kepegawaian dan penata usahaan keuangan Satuan Kerja;
- c. menyusun rencana kerja operasional sekretariat berdasarkan program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan (RKA) Satuan Kerja;
- e. mengkoordinir penyusunan DPA/DPPA Satuan Kerja;
- f. mengkoordinir penyusunan kebutuhan anggaran kas Satuan Kerja;
- g. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- h. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan sesuai kebutuhan unit kerja agar kegiatan pokok dapat terlaksana dengan lancar;
- i. mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan hukum sesuai dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. mengkoordinir penyusunan program kerja Satuan Kerja berdasarkan masukan dari unit kerja agar tercapai sasaran yang telah ditentukan;
- k. mengkoordinir pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh satuan unit kerja agar pelaksanaan tugas satuan unit kerja dapat berjalan lancar;
- l. mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan unit kerja melalui pemantauan dan monitoring;
- m. menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
- n. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban dan penyusunan program lanjutan; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. memimpin sub bagian umum dalam pelaksanaan kegiatan teknis administrasi umum, perlengkapan dan peralatan, penataan arsip,kepegawaian;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan teknis administrasi umum, perlengkapan dan peralatan, penataan arsip, kepegawaian;
- c. menyusun rencana kerja operasional sub bagian umum berdasarkan program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan perpustakaan;
- e. melakukan inventarisasi, pengadaan, mengelola dan memelihara serta mengamankan alat-alat perlengkapan kantor dan perpustakaan;
- f. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait baik internal maupun eksternal;
- g. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan dan perjalanan Badan sesuai kebutuhan agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- h. mengkoordinir kegiatan pelayanan kerumah tanggaan dan keprotokolan sesuai rencana kebutuhan masing-masing unit untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- i. mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan kepegawaian;
- j. menyiapkan dan menyusun daftar rencana daftar urut kepangkatan (DUK) dan analisi jabatan;
- k. menyiapkan data dan bahan perlengkapan untuk pengusulan dan pengangkatan dalam jabatan;
- l. menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas membantu membantu kepala badan dalam menyelenggarakan manajemen pengelolaan pendapatan daerah. Bidang Pendapatan mempunyai Fungsi :

- a. memimpin Bidang Pendapatan dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah;
- c. pelaksanaan pendaftarandan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah;
- d. penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
- e. penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah;
- g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- h. menyusun rencana kerja operasional bidang pendapatan berdasarkan program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja pada seksi Pendaftaran dan Pendataan, seksi Penetapan, dan pengendalian operasional pendapatan daerah;
- j. membuat dan menyampaikan rencana penerimaan dan target yang bersumber dari pendapatan asli daerah, yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari masing-masing unit pengelola;
- k. membuat rancangan surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. menyiapkan surat permintaan data realisasi penerimaan dan tunggakan dari bendahara penerimaan pada masing-masing SKPD;
- m. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi serta analisis kebutuhan sarana dan prasarana bidang pendapatan;
- n. melaksanakan evaluasi terhadap laporan realisasi pendapatan asli daerah, serta pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan

- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas :

- a. memimpin seksi pendaftaran dan pendataan dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pendaftaran dan pendataan pendapatan daerah selain pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- b. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, SPTPD/SPOP PBB yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- c. melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Daerah;
- d. menyusun rencana kerja operasional seksi pendaftaran dan pendataan berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan pendataan objek penerimaan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi;
- f. menyediakan data pokok keperluan, perhitungan dana perimbangan serta mengkoordinasikannya dengan instansi terkait;
- g. menyediakan data pokok keperluan , perhitungan dana lain-lain pendapatan daerah yang sah serta mengkoordinasikannya dengan instansi terkait;
- h. menyelenggarakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- i. melakukan pelayanan pengaduan, pengurangan dan keberatan dibidang pajak daerah;
- j. membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan menerbitkan kartu pengenal Npwpd;
- k. menyelenggarakan pendataan dan pengkajian dan pengembangan pendapatan asli daerah;
- l. menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

6. Sub Bidang Penetapan

Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas :

- a. memimpin seksi penetapan dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penetapan rencana penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- c. melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
- d. menyusun rencana kerja operasional seksi penetapan berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menyusun dan menyampaikan rencana penerimaan dan target atas potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- f. melaksanakan perhitungan dan penetapan besarnya pendapatan asli daerah;
- g. menyelenggarakan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta menyiapkan bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah;
- i. menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

7. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu membantu kepala badan dalam menyelenggarakan manajemen pengelolaan pendapatan yang bersumber dari PBB dan BPHTB. Bidang PBB dan BPHTB mempunyai Fungsi :

- a. memimpin Bidang PBB dan BPHTB dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas tanah Dan Bangunan;
- b. menyusun rencana kerja operasional bidang PBB dan BPHTB berdasarkan program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pendataan PBB dan BPHTB, Seksi Penagihan PBB dan BPHTB dan Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
- d. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang PBB DAN BPHTB;
- e. membuat dan menyampaikan rencana penerimaan dan target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari PBB DAN BPHTB;
- f. membuat rancangan dan Menerbitkan DHKP, SPPT dan STTS PBB berikut SPPT Piutang PBB;
- g. mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi SSPD BPHTB;
- h. melakukan Penilaian Nilai Jual Objek Pajak;
- i. menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan PBB P-2;
- j. mengolah data formulir pendaftaran/SPOP PBB P-2, menerbitkan dan mendistribusikannya kepada Wajib Pajak;
- k. mengolah data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan entri data mutasi PBB P-2 berdasarkan SSPD BPHTB;
- l. melakukan perubahan peta dan data entri hasil pelayanan PBB-P2;
- m. menyusun laporan mengenai realisasi dan tunggakan PBB-P2 dan BPHTB;
- n. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi serta analisis kebutuhan sarana dan prasarana bidang PBB dan BPHTB;
- o. menyelenggarakan informasi penerimaan daerah bersumber dari PBB dan BPHTB;
- p. melaksanakan evaluasi terhadap laporan realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB; dan
- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB

Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB mempunyai tugas :

- a. memimpin seksi Pendataan dan Penetapan PBB DAN BPHTB dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pendaftaran dan pendataan Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB;
- b. melakukan pendataan data objek pajak PBB dan BPHTB;
- c. mengadakan penelitian lapangan pajak PBB dan BPHTB;
- d. melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak PBB dan BPHTB;
- e. melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB P-2;
- f. menyusun rencana kerja operasional seksi pendataan dan penetapan PBB dan BPHTB berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- h. menyediakan data pokok keperluan , perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- i. melakukan pelayanan pengaduan,, pengurangan dan keberatan dibidang pajak PBB P-2 dan BPHTB;
- j. melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak PBB dan BPHTB;
- k. melakukan penetapan NJOP sesuai data formulir yang ada; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

9. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB

Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas :

- a. memimpin seksi penagihan dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penagihan PBB DAN BPHTB;
- b. melakukan penagihan pajak PBB dan BPHTB yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- c. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;

- d. menyusun rencana kerja operasional seksi penagihan berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan penyuluhan PBB DAN BPHTB;
- f. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan PBB dan BPHTB;
- g. menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

10. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu kepala badan dalam merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan anggaran. Bidang Anggaran mempunyai Fungsi :

- a. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA dan PPAS dan perubahan;
- b. koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD/ SKPKD dan atau RKAP/ DPPA SKPD/ SKPKD;
- c. penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
- d. penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD/SKPKD;
- e. mengkoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan;
- f. pengelolaan informasi teknologi keuangan daerah;
- g. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Sub Bidang Anggaran 1

Sub Bidang Anggaran 1 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada BLUD dan SKPD urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah pada BLUD dan SKPD pada urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar;
- c. melaksanakan verifikasi RKA/RKPA-SKPD dengan tim anggaran pemerintahan daerah pada SKPD urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar;
- d. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD pada SKPD urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar;
- e. melaksanakan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD SKPD urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar;
- f. melaksanakan penyiapan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD pada SKPD urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar;
- g. menyiapkan bahan persetujuan dan pengesahan DPA pada SKPD pada urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

12. Sub Bidang Anggaran 2

Sub Bidang Anggaran 2 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada SKPD urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah pada SKPD urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar;
- c. melaksanakan verifikasi RKA/RKPA-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD dengan tim anggaran pemerintah daerah pada SKPD urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar;
- d. menyiapkan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA-SKPD pada SKPD urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar;

- e. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD pada SKPD urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar;
- f. melaksanakan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD pada SKPD urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar;
- g. melaksanakan penyiapan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD pada SKPD urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar;
- h. menyiapkan bahan penyusunan anggaran pembiayaan daerah pada SKPD urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar;
- i. meneliti dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pendapatan dan pembiayaan pada SKPD urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

13. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas membantu kepala badan dalam merumuskan kebijakan, Menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan asset daerah. Bidang Aset mempunyai Fungsi :

- a. penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- b. penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- c. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja sub bidang perencanaan kebutuhan, pengawasan dan pengendalian dan penghapusan barang milik daerah barang milik daerah;
- d. mempersiapkan pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten;

- e. menyusun rencana operasional kerja bidang aset berdasarkan program dan sasaran yang sudah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. penyiapan petunjuk teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah, administrasi umum barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan dan pemanfaatan, inventarisasi dan penilaian, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan barang milik daerah dan pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. penyiapan rancangan pedoman pengelolaan barang milik daerah;
- h. penyiapan penyusunan dan penganalisaan data kebutuhan perlengkapan dan pengadaan barang serta Rencana Tahunan Barang Daerah (RTBD);
- i. penyusunan standarisasi sarana dan prasarana Pemerintah Daerah serta standarisasi Harga Barang dan Jasa;
- j. penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Pengguna Barang Tahunan (LBPT) yang berkedudukan dalam penguasaannya kepada pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah;
- k. menyusun mekanisme penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- l. pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah atau barang milik lainnya dari perolehan yang sah;
- m. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- n. penyiapan administrasi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah atau pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah dan atau DPRD sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- o. melaksanakan pembinaan dan penyiapan petunjuk teknis pengawasan, pengendalian dan evaluasi barang milik daerah;
- p. pelaksanaan inventarisasi dan penilaian barang milik daerah, dan barang lainnya dari perolehan yang sah;

- q. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah dan barang lainnya dari perolehan yang sah;
- r. melakukan koordinasi dengan unit pengguna barang; dan
- s. melaksanakan tugas lainya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :

- a. memimpin sub bidang perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);
- c. menyiapkan bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD);
- d. menyiapkan bahan penyusunan analisis standar harga barang;
- e. merencanakan pengadaan tanah;
- f. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja sub bidang pengadaan;
- g. menyusun rencana operasional kerja bidang aset berdasarkan program dan sasaran yang sudah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. merumuskan pedoman teknis pengadaan barang milik daerah
- i. merencanakan kebutuhan barang milik daerah;
- j. penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- k. melakukan penata usahaan pengadaan barang milik daerah;
- l. melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan barang milik daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

15. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah mempunyai tugas

:

- a. memimpin sub bidang pengawasan dan pengendalian barang milik daerah dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
- b. melakukan pengamanan barang milik daerah;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah;
- d. melakukan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah;
- e. mengadakan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris;
- f. melakukan penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindah tangan barang milik daerah;
- g. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja sub pengawasan dan pengendalian;
- h. merencanakan kebutuhan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- i. melaksanakan pengamanan barang milik daerah;
- j. melakukan penatausahaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- k. menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

16. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan mempunyai Fungsi :

- a. memimpin Bidang Perbendaharaan dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penatausahaan pengelolaan perbendaharaan daerah;
- b. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja sub bidang verifikasi, sub bidang pencairan dana, dan sub bidang pembukuan;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
- d. pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;

- e. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- f. pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
- h. menyusun rencana operasional kerja bidang perbendaharaan berdasarkan program dan sasaran yang sudah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. penyiapan petunjuk teknis dan pedoman pengelolaan perbendaharaan daerah, dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah;
- j. menyiapkan anggaran kas pemerintah daerah;
- k. menyiapkan rancangan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- l. menyiapkan SP2D;
- m. melakukan verifikasi dokumen SPM SKPD;
- n. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- o. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- p. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- q. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- r. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan daerah;
- s. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; dan
- t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Sub Bidang Verifikasi

Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas :

- a. memimpin sub bidang verifikasi dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan legalitas dokumen penatausahaan pengelolaan perbendaharaan daerah;
- b. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja sub bidang verifikasi;
- c. menyusun rencana operasional kerja sub bidang verifikasi berdasarkan program dan sasaran yang sudah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. penyiapan petunjuk teknis dan pedoman penilaian legalitas dokumen perbendaharaan daerah, dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah;
- e. menerima dan memeriksa keabsahan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- f. menerima dan memeriksa keabsahan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- g. melakukan pengujian surat perintah pembayaran;
- h. memeriksa ketersediaan dana yang dimintakan oleh SKPD dengan ketersediaan anggaran kas dan pagu APBD/DPA/DPPA;
- i. melakukan verifikasi transaksi keuangan;
- j. melakukan penelitian, penilaian dan rekonsiliasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
- k. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD dalam rangka rekonsiliasi pengeluaran anggaran belanja daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

18. Sub Bidang Pencairan Dana

Sub Bidang Pencairan Dana mempunyai tugas :

- a. memimpin sub bidang pencairan dana dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan proses pengeluaran uang dari kas daerah;

- b. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja sub bidang pencairan dana;
- c. menyusun rencana operasional kerja sub bidang pencairan dana berdasarkan program dan sasaran yang sudah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. penyiapan petunjuk teknis dan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- e. melakukan rekonsiliasi harian terhadap penerimaan/pengeluaran kas dengan Bank Operasional;
- f. mempersiapkan rancangan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- g. mempersiapkan rancangan SP2D;
- h. menyiapkan laporan kas posisi harian setiap akhir jam kerja;
- i. menyiapkan laporan kas posisi mingguan dan bulanan;
- j. pengesahan surat keterangan penghentian pembayaran;
- k. penyusunan laporan realisasi pencairan anggaran; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

19. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan akuntansi dan pelaporan. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis di bidang akuntansi dan pelaporan;
- c. penyusunan regulasi tentang akuntansi dan pelaporan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan;
- e. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Sub Bidang Pembinaan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah

Sub Bidang Pembinaan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja sub bidang pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
- c. melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional SKPD;
- d. melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD;
- f. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah;
- h. melaksanakan pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah;
- i. menyiapkan bahan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional;
- j. menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- k. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber daya aparatur pengelola anggaran SKPD;
- l. menyusun rencana operasional kerja sub bidang pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah berdasarkan program dan sasaran yang sudah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- m. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi dan pelaporan;

- n. melakukan sosialisasi implementasi standar akuntansi dan pelaporan pemerintah;
- o. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar akuntansi dan pelaporan pemerintah; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

21. Sub Bidang Pelaporan Keuangan

Sub Bidang Pelaporan Keuangan mempunyai tugas :

- a. memimpin sub bidang pelaporan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- b. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja sub bidang pelaporan keuangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
- d. melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional SKPD;
- e. melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional;
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD;
- g. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah;
- i. menyiapkan bahan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional;
- j. menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- k. menyusun rencana operasional kerja sub bidang pelaporan keuangan berdasarkan program dan sasaran yang sudah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- l. melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan pengguna anggaran;

- m. melakukan konsolidasi/penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi laporan keuangan SKPD;
- o. menyusun laporan berkala pelaksanaan APBD;
- p. menyusun laporan smesteran dan prognosis;
- q. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

22. Kelompok Jabatan Fungsional

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kompetensi, keahlian atau keterampilan yang sesuai.
3. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

23. Kelompok Jabatan Pelaksana

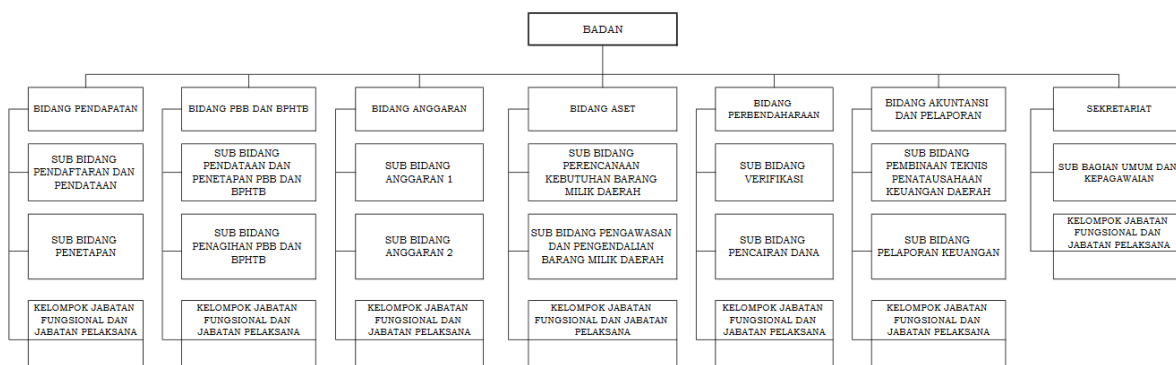
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat membentuk Jabatan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan. Jabatan Pelaksana merupakan klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

1. Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
2. Kelompok Jabatan Pelaksana tentukan berdasarkan kompetensi, keahlian atau keterampilan yang sesuai.
3. Jabatan Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Lampiran Peraturan Bupati Padang Lawas Utara
Nomor : 49
Tanggal : 26 Juni 2023

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



DAFTAR PUSTAKA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
JULI 2023
BUPATI PADANG LAWAS UTARA
ANDAR AMIN HARAHAP

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Dto,

ANDAR AMIN HARAHAP

1.2.3 JUMLAH PEGAWAI ASN

Jumlah pegawai ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara per Desember Tahun 2023 adalah sebanyak 33 orang, terdiri dari 19 orang Pegawai Laki-laki dan 13 Orang Pegawai Perempuan. Berikut Komposisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara :

1. Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 1.1
Jumlah pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Magister (S2)	7	
2	Sarjana (S1)	21	
3	Diploma III	1	
4	Diploma II	-	
5	Diploma I	-	
6	SLTA	3	
7	SLTP	-	
8	SD	-	
Jumlah		32	

2. Menurut Golongan

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Gol IV	3	
2	Gol III	26	
3	Gol II	3	
4	Gol I	-	
Jumlah		32	

3. Menurut Jabatan

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Jabatan PimpinanTinggi	1	
2	Jabatan Administrator	7	
3	Jabatan Pengawas/Fungsional	15	
4	Jabatan Pelaksana	9	
Jumlah		32	

1.3 PERMASALAHAN UTAMA

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dapat diidentifikasi dalam 2 (dua) klasifikasi permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Opini WTP atas LKPD Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dan belanja daerah relatif masih rendah atau sebaliknya pendapatan transfer memberi kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah dan mendanai belanja daerah;
3. Belum terwujudnya tata kelola aset tetap yang tertib administrasi dari kurang akuratnya data barang milik daerah;

4. Belum terwujudnya tata kelola persediaan barang secara tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan; dan
5. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas.

1.4 DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi pedoman penyusunan LKjIP adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 88;
- g. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara No 49 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 PENJELASAN UMUM BPKPD
- 1.3 PERMASALAHAN UTAMA
- 1.4 DASAR HUKUM
- 1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 TUJUAN DAN SASARAN BPKPD
- 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN
- 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 CAPAIAN KINERJA BPKPD
- 3.2 REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN BPKPD

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program di mana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 2202 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2023 BPKPD Kabupaten
Padang Lawas Utara

N O	TUJUAN	SASARAN STRATEGI S	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONA L	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Pengelolaan Pajak dan Keuangan Daerah	1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.	Paling Lambat Tanggal 31 Maret Tahun berjalan Penyampaian Laporan Keuangan Ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	Bidang Akuntansi/Perbendaharaan/Aset/Ummum
			2. Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Penetapan APBD tepat waktu merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah yang merupakan bentuk keberhasilan dalam kinerja keuangan pada proses perencanaan dan penganggaran.	3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk di Evaluasi sebelum ditetapkan	Bidang Anggaran
			3. Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah	Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah adalah suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan menjadikan Pendapatan Asli Daerah lebih baik.	Pendapatan Wajib Pajak	Bidang Pendapatan/PBB dan BPHTB
		2. Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	4. Pengamanan Aset	Pengamanan Aset merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum	Jumlah Sertifikat/Jumlah Persil (Bidang) Tanah	Bidang Aset

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan Renstra Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 –2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan target Kinerja Jangka Menengah BPKPD
Kabupaten Padang Lawas Utara 2021 - 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Pengelolaan Pajak dan Keuangan Daerah		Persentase Ketepatan Penetapan APBD	100%	100%	100%
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP
		Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah	Rp 15.777.042.985	Rp 15.007.328.707	Rp 15.007.328.707
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	Pengamanan Aset	44%	66%	100%

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara 2019-2023 tersebut di atas dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan

menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

2.2 RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Perubahan Renja BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perubahan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 BPKPD
Kabupaten Padang Lawas Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targ et	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	0 2				KEUANGAN							387.963.571. 335				423,214,09 2,9 60		
5	0 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							18.264.540.4 85				25,503,479 ,01 3		
5	0 2	0 1	2,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							131.932.000				155.485.00 0		
5	0 2	0 1	2,0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggar an dan Evaluasi Kinerja	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	0 Dokum en 2 Dokum en	7 Dokum en	33.103.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Ko ta	100 %	31.097.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targ et	
5	02	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggar an dan Evaluasi Kinerja	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 Dokum en	7 Dokum en	14.127.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Ko ta	100 %	15.548.500
5	02	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggar an dan Evaluasi Kinerja	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 Dokum en	7 Dokum en	14.127.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Ko ta	100 %	15.548.500
5	02	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggar an dan Evaluasi Kinerja	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 Dokum en	7 Dokum en	14.127.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Ko ta	100 %	15.548.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targ et	
5	0	0	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggar an dan Evaluasi Kinerja	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 Dokum en	7 Dokum en	14.127.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Ko ta	100 %	15.548.500
5	0	0	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggar an dan Evaluasi Kinerja	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 Lapora n	7 Dokum en	28.194.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Ko ta	100 %	31.097.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Targ et	
5	02	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	7 Dokumen	14.127.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	100 %	31.097.000	
5	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								15.631.322.185			23,189,501,299			
5	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Orang/bulan	5 Kegiatan	14.564.420.485	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	100 %	21.869.179.329	
5	02	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	5 Kegiatan	965.478.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	100 %	1.275.912.220	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targ et	
									Keluraha n					Umu m				
5	0 2	0 1	2,0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 Dokum en	5 Kegiatan	57.653.100	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Ko ta	100 %	14.803.250
5	0 2	0 1	2,0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 Lapora n	5 Kegiatan	20.808.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Ko ta	100 %	14.803.250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targ et	
5	0	0	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul ana n/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 Lapora n	5 Kegiata n	22.962.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Ko ta	100 %	14.803.250	
5	0	0	2,0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								95.915.000	100.006.500				
5	0	0	2,0	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	105 Unit	6 Kegiata n	24.000.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Ko ta	100 %	26.400.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targ et	
5	02	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	6 Kegiatan	33.457.500	Dana Transf er Umu m- Dana Alokasi Umu m		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	100 %	36.803.250
5	02	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	6 Kegiatan	33.457.500	Dana Transf er Umu m- Dana Alokasi Umu m		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	100 %	36.803.250
5	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Orang	6 Kegiatan	5.000.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokasi Umu m		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	100 %	0
5	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.125.138.500	1.103.884.214				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targ et	
5	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	4 Paket	7 Kegiatan	25.213.600	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	100 %	19.543.150
5	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	12 Paket	7 Kegiatan	424.235.500	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	100 %	410.628.794
5	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	4 Paket	7 Kegiatan	45.973.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	100 %	50.572.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targ et	
5	0	0	2,0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	12 Paket	7 Kegiat an	73.100.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Ko ta	100 %	80.410.000
5	0	0	2,0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	4 Paket	7 Kegiat an	162.478.400	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Ko ta	100 %	190.289.770
5	0	0	2,0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	65 Dokum e n	7 Kegiat an	44.424.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Ko ta	100 %	48.866.400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targ et	
5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	7 Kegiatan	349.714.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	303.573.600
5	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								437.912.800	88.000.000				
5	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	5 Kegiatan	357.912.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	0
5	02	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	5 Kegiatan	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	88.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targ et	
5	0	0	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								489.000.000			532.950.000		
5	0	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kegiatan Penyediaan Urusan Pemerintah n Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	2 Lapora n	4 Kegiatan	15.000.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Ko ta	100 %	11.000.000
5	0	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	12 Lapora n	4 Kegiatan	324.000.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Ko ta	100 %	356.400.000
5	0	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	4 Lapora n	4 Kegiatan	150.000.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Ko ta	100 %	165.550.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targ et	
5	0 2	0 1	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							353.320.000				333.652.00 0		
5	0 2	0 1	2,0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	19 Unit	4 Kegiatan	342.540.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Ko ta	100 %	321.794.000
5	0 2	0 1	2,0 9	1 0	Pemeliharaan/R eha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir eha bilitasi	Jumlah Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	2 Unit	4 Kegiatan	10.780.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Ko ta	100 %	11.858.000
5	0 2	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							366.061.459. 250				393,971,53 3,2 13		
5	0 2	0 2	2,0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							2.151.613.40 0				1.729.214. 740		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targ et	
5	0	2	0	2,0	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	2 Dokum en	13 Kegiata n	129.021.500	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m	Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	144.497.650
5	0	2	0	2,0	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	2 Dokum en	13 Kegiata n	156.605.500	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m	Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	141.923.650
5	0	2	0	2,0	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah		100 %	1 Dokum en	13 Kegiata n	65.010.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m	Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	68.937.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targ et	
5	0	0	2,0	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 Dokum en	13 Kegiatan	60.330.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m	Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	68.937.000	
5	0	0	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah		100 %	2 Dokum en	13 Kegiatan	849.548.800	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m	Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	404.765.020	
5	0	0	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah		100 %	2 Dokum en	13 Kegiatan	454.028.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m	Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	454.492.500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targ et	
5	0 2	0 2	2,0 1	0 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah		100 %	3 Dokum en	13 Kegiata n	175.495.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	199.662.100
5	0 2	0 2	2,0 1	1 3	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kot a	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah		100 %	150 Orang	13 Kegiata n	261.574.600	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	245.999.820
5	0 2	0 2	2,0 2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								11.409.713.2 14	12,502,046 ,46 1				
5	0 2	0 2	2,0 2	0 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendahar aan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua	100 %	32200 Doku men	11 Kegiata n	265.860.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i		Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	292.446.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targ et	
									Keluraha n					Umu m				
5	0 2	0 2	2,0 2	0 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendahar aan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	200 Dokum en	11 Kegiata n	19.400.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	21.340.000
5	0 2	0 2	2,0 2	0 4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaa n Pembiayaan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendahhar aan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	88 Dokum e n	11 Kegiata n	10.854.002.21 4	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	11.853.205. 961

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targ et	
5	0	0	2,0	0	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendahar aan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	40 Dokum e n	11 Kegiata n	50.626.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m	Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	59.422.000	
5	0	0	2,0	0	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendahar aan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	43 Dokum e n	11 Kegiata n	19.876.400	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m	Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	55.689.040	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targ et	
5	0	0	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pem otongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pem otongan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendahhar aan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	43 Lapora n	11 Kegiata n	121.125.400	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m	Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	133.237.940	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Targ et	
							dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)											

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targ et	
5	02	02	2,02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	11 Kegiatan	39.103.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	43.013.520	
5	02	02	2,02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	43 Dokumen	11 Kegiatan	39.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	43.692.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targ et	
5	0 2	0 2	2,0 3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							1.810.503.90 0	1.825.706. 410					
5	0 2	0 2	2,0 3	0 1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Lapora n	12 Kegiatan	170.816.400	Dana Transf er Umu m-Dana Alokas i Umu m	Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	105.178.040	
5	0 2	0 2	2,0 3	0 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjwab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjwab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Lapora n	12 Kegiatan	148.437.200	Dana Transf er Umu m-Dana Alokas i Umu m	Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	135.560.700	
5	0 2	0 2	2,0 3	0 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Lapora n	12 Kegiatan	525.859.900	Dana Transf er Umu m-Dana Alokas i Umu m	Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	578.457.330	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Targ et	
5	02	02	2,03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja wab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot a dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja wab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot a	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja wa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Ko ta dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja wab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Ko ta	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	2 Dokum en	12 Kegiatan	479.531.500	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	605.602.250	
5	02	02	2,03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara an Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara an Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 Dokum en	12 Kegiatan	218.933.900	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	189.989.690	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targ et	
5	0	0	2,0	1	0	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 Dokum en	12 Kegiat an	91.799.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m	Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	18.258.900
5	0	0	2,0	1	1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungja wab an Pemerintah Kabupaten/Kot a	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungja wa ban Pemerintah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	41 Orang	12 Kegiat an	175.126.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m Dana Transf er Khusu s- Dana Alokas i Khusu s Non Fisik	Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	192.659.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targ et	
5	0 2	0 2	2,0 4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								350.040.017. 836				377,089,11 3,6 12	
5	0 2	0 2	2,0 4	0 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	2 Lapora n	10 Kegiatan	343.192.299.2 00	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	368,663,750 ,42 9
5	0 2	0 2	2,0 4	0 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 Lapora n	10 Kegiatan	3.000.000.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	5.500.000.0 00
5	0 2	0 2	2,0 4	1 0	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kot a	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Ko ta	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua	100 %	2 Lapora n	10 Kegiatan	3.847.718.636	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i		Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	2.925.363.1 83

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Targ et	
									Keluraha n					Umu m				
5	0 2	0 2	2,0 5		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							649.610.900	825.451.99 0					
5	0 2	0 2	2,0 5	0 2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementas i Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokum en	2 Kegiata n	239.466.400	Dana Transf er Umu m-Dana Alokas i Umu m		Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	374.293.040
5	0 2	0 2	2,0 5	0 3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kot a	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementas i Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	574 Orang	2 Kegiata n	410.144.500	Dana Transf er Umu m-Dana Alokas i Umu m		Persentase Pengelolaa n Keuangan Daerah	100 %	451.158.950

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an					Tolok Ukur	Targ et	
							Kabupaten/Ko ta												
5	0 2	0 3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							1.302.073.70 0			1.586.282. 944				
5	0 2	0 3	2,0 1		Pengelolaan Barang Milik Daerah							1.302.073.70 0			1.586.282. 944				
5	0 2	0 3	2,0 1	0 1	Penyusunan Standar Harga	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	80 %	2 Dokum en	13 Kegiat an	137.044.100	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pengelolaa n Barang Milik Daerah	80 %	187.831.600	
5	0 2	0 3	2,0 1	0 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	80 %	1 Dokum en	13 Kegiat an	17.954.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pengelolaa n Barang Milik Daerah	80 %	18.852.900	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targ et	
5	0	0	2,0	0	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	80 %	2 Dokum en	13 Kegiata n	28.493.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pengelolaa n Barang Milik Daerah	80 %	30.462.300
5	0	0	2,0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	80 %	1 Lapora n	13 Kegiata n	372.830.200	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pengelolaa n Barang Milik Daerah	80 %	188.694.000
5	0	0	2,0	0	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	80 %	1 Lapora n	13 Kegiata n	571.443.400	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pengelolaa n Barang Milik Daerah	80 %	927.767.944

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targ et	
5	02	03	2,01	0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	3 Dokumen	13 Kegiatan	63.376.000	Dana Transf er Umu m-Dana Alokas i Umu m		Persentase Pengelolaa n Barang Milik Daerah	80 %	86.989.100
5	02	03	2,01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Lapora n	13 Kegiatan	13.877.000	Dana Transf er Umu m-Dana Alokas i Umu m		Persentase Pengelolaa n Barang Milik Daerah	80 %	20.720.260
5	02	03	2,01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua	80 %	2 Lapora n	13 Kegiatan	97.056.000	Dana Transf er Umu m-Dana Alokas i		Persentase Pengelolaa n Barang Milik Daerah	80 %	124.964.840

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targ et	
									Keluraha n					Umu m				
5	0 2	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							2.335.497.90 0	2.152.797. 790					
5	0 2	0 4	2,0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							2.335.497.90 0	2.152.797. 790					
5	0 2	0 4	2,0 1	0 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	12 Unit	14 Kegiatan	256.200.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pengelolaa n Pendapata n Daerah	100 %	281.820.000
5	0 2	0 4	2,0 1	0 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	8 Lapora n	14 Kegiatan	54.278.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pengelolaa n Pendapata n Daerah	100 %	70.452.800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an		Tolak Ukur		Targ et		
5	02	04	2,01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	14 Kegiatan	37.952.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	83.747.400
5	02	04	2,01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	61000 Obyek Pajak	14 Kegiatan	1.235.556.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	1.052.812.970

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targ et	
5	0	0	2,0	0	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	8 Dokum en	14 Kegiatan	197.795.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pengelolaa n Pendapata n Daerah	100 %	201.139.620
5	0	0	2,0	1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	8 Dokum en	14 Kegiatan	429.720.000	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m Dana Transf er Khusu s- Dana Alokas i Khusu s Non Fisik		Persentase Pengelolaa n Pendapata n Daerah	100 %	420.959.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Cata ta n Penti n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat a n	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an					Tolok Ukur	Targ et	
5	0	0	2,0	1	4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Lapora n	14 Kegiat a n	123.995.600	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m		Persentase Pengelolaa n Pendapata n Daerah	100 %	41.866.000
TOTAL													387.963.571. 335				423,214,09 2,9 60		

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berisikan penugasan dari Kepala Badan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui Perjanjian Kinerja inilah, kinerja Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal, pada tahun periode berjalan 2023 telah dilakukan mid-term review atas Renstra Tahun 2019-2023 Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten. Perubahan Perjanjian Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	WTP	WTP
		Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu.	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu.	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU
		Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah.	Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah.	15.007.328.707	15.007.328.707
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	Pengamanan Aset.	Pengamanan Aset.	100 %	100 %

No	Program		Anggaran		Keterangan	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 5.148.189.200,-	Rp. 4.945.178.600,-	APBD	PERUBAHAN APBD
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.242.073.700,-	Rp. 1.302.073.700,-	APBD	PERUBAHAN APBD
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 2.155.573.900,-	Rp. 2.335.497.900,-	APBD	PERUBAHAN APBD
JUMLAH			Rp. 8.545.836.800,-	Rp. 8.582.750.200,-	APBD	PERUBAHAN APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA BPKPD

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Realisasi Capaian Kinerja}}{\% \text{ Target Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran skala ordinal seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Angka	Interprestasi	Warna
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	Green
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	Blue
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	Yellow
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	Red
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	Grey

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target Indikator Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah ditetapkan dilakukan dengan Tabel berikut :

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1.1
Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Masih dalam proses	0%	Bidang Akuntansi/Perbendaharaan/Aset
		Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Bidang Anggaran
		Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah	15.007.328.707	18.926.632.967	126%	Bidang Pendapatan dan PBB BPHTB
2.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	Pengamanan Aset	100%	75%	75%	Bidang Aset

3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tabel 3.1.2
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WTP	Masih dalam proses	0%
		Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
		Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah	17.589.739.765	19.214.146.280	15.007.328.707	18.926.632.967	126%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	Pengamanan Aset	26%	23%	100%	75%	75%

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis BPKPD

Tabel 3.1.3
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis BPKPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis (2023)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Masih dalam proses	WTP	0%
		Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
		Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah	18.926.632.967	15.007.328.707	126%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	Pengamanan Aset	75%	100%	75%

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Table 3.1.4
Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/Provinsi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
		Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu			
		Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah			
2.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	Pengamanan Aset			

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 3.1.5
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Masih dalam proses	0%	Kegagalan	Memperbaiki dokumen laporan keuangan OPD

		Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Keberhasilan	-
		Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah	15.007.328.707	18.926.632.967	126%	Keberhasilan	-
2.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	Pengamanan Aset	100%	75%	75%	Keberhasilan	-

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Masih dalam proses	0%	3.015.825.800	2.625.614.650	87%	Tidak Efisien
		Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	1.929.352.800	1.783.260.400	92%	Efisien
		Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah	15.007.328.707	18.926.632.967	126%	2.335.497.900	2.264.079.100	97%	Efisien
2.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	Pengamanan Aset	100%	75%	75%	1.302.073.700	1.137.443.700	87%	Efisien

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.1.7
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	89,16%	Menunjang	
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	96,79%	Menunjang	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	83,89%	Menunjang	
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	87,58%	Menunjang	
		Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	100%	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	92,43%	Menunjang	
		Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah	126%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	96,94%	Menunjang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	96,94%	Menunjang	
2.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	Pengamanan Aset	75%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	87,36%	Menunjang	
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	87,36%	Menunjang	

3.1.8 Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa dari empat (4) Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

- 1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah** memiliki target WTP dengan capaian masih dalam proses audit BPK.
- 2. Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu** dimana tahun 2023 memiliki target Tepat Waktu dengan capaian Tepat Waktu (100%).
- 3. Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah** memiliki target Rp. 15.007.328.707 dengan capaian Rp. 18.926.632.967 (126%).
- 4. Pengamanan Aset** tahun 2023 memiliki target 100% dengan capaian 75%.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara

target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar 75,25% (Sedang), yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran.

$$(0\% + 100\% + 75\% + 126\% / 4) = 75,25\% \text{ (Sedang)}$$

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 melaksanakan 2 (dua) sasaran strategis, dimana sasaran strategis tersebut didukung oleh program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Untuk mendukung sasaran strategi tersebut BPKPD melaksanakan 4 program.

SASARAN 1 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 : Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	TARGET : WTP
--	--	---------------------

Sasaran 1 : Dengan indikator 1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2023 dan target WTP dengan capaian masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan, dalam hal ini dimana pencapaian terlaksananya indikator tersebut dengan program yang dilaksanakan oleh BPKPD yaitu :

- **Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**, dalam hal ini Opini Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dengan tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten padang lawas utara tahun anggaran 2023 yang diserahkan pada tahun 2024, namun sampai saat ini pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian belum diterima oleh pemerintah kabupaten padang lawas utara karena masih dalam tahap pemeriksaan BPK.

Upaya - upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target tersebut sebagai berikut :

- Melakukan perbaikan sistem
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- Hal-hal yang menjadi rekomendasi pemeriksaan atas LKPD pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun-tahun sebelumnya yang diperoleh dari dan pola arah perbaikan menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik secara bertahap dan berkesinambungan.

SASARAN 1 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 : Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	TARGET : Tepat Waktu
--	---	-----------------------------

Sasaran 1 : Dengan indikator 2. Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu pada tahun 2023 dan target Tepat Waktu dengan capaian Tepat Waktu (100%), dalam laporan pencapaian terlaksananya indikator tersebut dengan program yang dilaksanakan oleh BPKPD yaitu :

- **Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** dalam hal ini ketepatan waktu dalam penyusunan penetapan APBD sesuai target per 31 Desember dituang dalam bentuk pernyataan kesepakatan persetujuan bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara tentang

rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten padang lawas utara dalam bentuk berita acara dan sesuai dengan permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyusunan APBD. Ketepatan waktu pengesahan APBD yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan antar DPRD dan Bupati berupa Ranperda APBD menjadi APBD yang di sah paling lambat tanggal 30 november untuk APBD Murni, dan Perubahan APBD paling lambat 30 September.

Upaya - upaya yang dicapai dalam mempertahankan target tersebut sebagai berikut :

- Penetapan APBD harus dilakukan tepat waktu agar program kegiatan dan pembangunan yang direncanakan terealisasi pada tahun anggaran.
- Dalam Penetapan APBD harus mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014 bahwa penetapan APBD 2014 paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

SASARAN 1 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 : Optimalisasi Capaian Pendapatan	TARGET : Rp. 15.007.328.707
--	--	---------------------------------------

Sasaran 1 : Dengan indikator 3. Optimalisasi Capaian Pendapatan pada tahun 2023 dan target Rp. 15.007.328.707 dengan capaian Rp. 18.926.632.967 (126%), dalam laporan pencapaian terlaksananya indikator tersebut dengan program yang dilaksanakan oleh BPKPD yaitu :

▪ **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Upaya - upaya yang dicapai dalam mempertahankan target tersebut sebagai berikut :

- Melakukan perubahan prosedur dan tata kerja terhadap pemungutan pajak maupun retribusi daerah anantara lain dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pola pungutan sesuai dengan perubahan dan dinamika perkembangan perekonomian masyarakat yang berorientasi pada pengoptimalan perolehan pendapatan tanpa mengesampingkan peningkatan pelayanan kepada obyek pajak atau retribusi daerah.
- Meningkatkan PAD melalui penggalian potensi sumber daya alam yang ada seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan kemampuan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberlanjutan hasilnya yang diikuti dengan meningkatnya fungsi – fungsi pelayanan pada masyarakat.
- Meningkatkan kesadaran para wajib pajak/retribusi daerah untuk melaksanakan kewajiban diimbangi dengan peningkatan pelayanan.
- Melakukan akselerasi pembangunan dengan stimulasi pembiayaan daerah untuk kegiatan yang bernilai tambah terhadap pendapatan.

- Melakukan kajian dan tindak lanjut kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan jenis – jenis PAD khususnya pada penerimaan retribusi daerah.

SASARAN 2 : Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 : Pengamanan Aset	TARGET : 100%
--	---	-------------------------

Sasaran 2 : Dengan indikator 4. Pengamanan Aset pada tahun 2023 dan target 100% dengan capaian 75%, dalam laporan pencapaian terlaksananya indikator tersebut dengan program yang dilaksanakan oleh BPKPD yaitu :

- **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** dalam hal ini target tidak tercapai dikarenakan spesifikasi barang hasil pengadaan yang tidak sesuai dengan kontrak, pencatatan penerimaan barang persediaan yang tidak rutin setiap bulan, keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban, kelalaian dalam mencatat pengadaan barang maupun pengeluaran barang. Kemudian dalam hal Kawasan hutan lindung dan Kawasan longsor yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Padang Lawas Utara. Keterbatasan kemampuan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan.

Upaya - upaya yang dicapai dalam meningkatkan target tersebut sebagai berikut :

- Peningkatan sumber daya aparatur agar semakin profesional dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang bertujuan untuk menambah potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Mengajukan ke Dinas PUTR terhadap pelepasan Kawasan hutan lindung Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Realisasi APBD Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 80.186.853.275.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023 memiliki struktur anggaran belanja daerah dalam DPA 2023 yang terdiri dari 2 (dua) pos pengeluaran, yaitu (1) belanja operasi dan (2) belanja modal. Pos pengeluaran belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja Modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin.

Berdasarkan DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023, total alokasi anggaran belanja adalah sebanyak Rp 396.943.013.335,00. dengan rincian belanja langsungnya adalah sebagai berikut :

Tabel Laporan Pengawasan Anggaran Defenitif Per Sub Kegiatan Per 31 Desember 2023
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.103.000,00	0,00	33.103.000,00	0,00	33.103.000,00	100,00	0,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	14.127.000,00	0,00	14.127.000,00	0,00	14.127.000,00	100,00	0,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.127.000,00	0,00	14.127.000,00	0,00	14.127.000,00	100,00	0,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.127.000,00	0,00	14.127.000,00	0,00	14.127.000,00	100,00	0,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	14.127.000,00	0,00	14.127.000,00	0,00	14.127.000,00	100,00	0,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.194.000,00	0,00	28.194.000,00	0,00	28.194.000,00	100,00	0,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.127.000,00	0,00	14.127.000,00	0,00	14.127.000,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	131.932.000,00	0,00	131.932.000,00	0,00	131.932.000,00	100,00	0,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.479.945.085,00	3.628.378.788,00	0,00	0,00	3.628.378.788,00	25,06	10.851.566.297,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	965.478.600,00	635.620.000,00	300.489.050,00	0,00	936.109.050,00	96,96	29.369.550,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57.653.100,00	0,00	56.468.500,00	0,00	56.468.500,00	97,95	1.184.600,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.808.000,00	0,00	20.808.000,00	0,00	20.808.000,00	100,00	0,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22.962.000,00	0,00	22.962.000,00	0,00	22.962.000,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	15.546.846.785,00	4.263.998.788,00	400.727.550,00	0,00	4.664.726.338,00	30,00	10.882.120.447,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.05.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	24.000.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	80,00	4.800.000,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33.457.500,00	0,00	33.457.500,00	0,00	33.457.500,00	100,00	0,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.05.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	33.457.500,00	0,00	33.457.500,00	0,00	33.457.500,00	100,00	0,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	95.915.000,00	0,00	91.115.000,00	0,00	91.115.000,00	95,00	4.800.000,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.213.600,00	0,00	25.213.600,00	0,00	25.213.600,00	100,00	0,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	424.235.500,00	0,00	398.734.100,00	0,00	398.734.100,00	93,99	25.501.400,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.973.000,00	0,00	45.423.000,00	0,00	45.423.000,00	98,80	550.000,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.100.000,00	0,00	73.100.000,00	0,00	73.100.000,00	100,00	0,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	162.478.400,00	0,00	113.114.400,00	0,00	113.114.400,00	69,62	49.364.000,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44.424.000,00	0,00	44.400.000,00	0,00	44.400.000,00	99,95	24.000,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	349.714.000,00	0,00	237.319.800,00	0,00	237.319.800,00	67,86	112.394.200,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.125.138.500,00	0,00	937.304.900,00	0,00	937.304.900,00	83,31	187.833.600,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	357.912.800,00	0,00	0,00	356.600.000,00	356.600.000,00	99,63	1.312.800,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	437.912.800,00	0,00	80.000.000,00	356.600.000,00	436.600.000,00	99,70	1.312.800,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	324.000.000,00	0,00	259.367.974,00	0,00	259.367.974,00	80,05	64.632.026,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	0,00	149.396.000,00	0,00	149.396.000,00	99,60	604.000,00
	TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	489.000.000,00	0,00	423.763.974,00	0,00	423.763.974,00	86,66	65.236.026,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	342.540.000,00	0,00	317.293.245,00	0,00	317.293.245,00	92,63	25.246.755,00
0.00 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.780.000,00	0,00	10.780.000,00	0,00	10.780.000,00	100,00	0,00
	TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.180.065.085,00	4.263.998.788,00	2.392.916.669,00	356.600.000,00	7.013.515.457,00	38,58	11.166.549.628,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01	TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	353.320.000,00	0,00	328.073.245,00	0,00	328.073.245,00	92,85	25.246.755,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	130.491.500,00	0,00	114.301.500,00	0,00	114.301.500,00	87,59	16.190.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	142.461.500,00	0,00	110.503.500,00	0,00	110.503.500,00	77,57	31.958.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	60.330.000,00	0,00	59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	97,99	1.210.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	60.330.000,00	0,00	59.120.000,00	0,00	59.120.000,00	97,99	1.210.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	834.246.800,00	464.400.000,00	356.311.800,00	0,00	820.711.800,00	98,38	13.535.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	441.278.000,00	0,00	408.523.000,00	0,00	408.523.000,00	92,58	32.755.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	175.495.000,00	0,00	154.594.600,00	0,00	154.594.600,00	88,09	20.900.400,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	84.720.000,00	39.000.000,00	17.386.000,00	0,00	56.386.000,00	66,56	28.334.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02	TOTAL KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.929.352.800,00	503.400.000,00	1.279.860.400,00	0,00	1.783.260.400,00	92,43	146.092.400,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	265.860.000,00	0,00	265.810.000,00	0,00	265.810.000,00	99,98	50.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02.3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	19.400.000,00	0,00	19.360.000,00	0,00	19.360.000,00	99,79	40.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02.4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	10.854.002.214,00	0,00	309.364.732,00	0,00	309.364.732,00	2,85	10.544.637.482,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02.5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	50.626.000,00	0,00	50.606.000,00	0,00	50.606.000,00	99,96	20.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02.6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	19.876.400,00	0,00	19.838.000,00	0,00	19.838.000,00	99,81	38.400,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	121.125.400,00	0,00	114.822.400,00	0,00	114.822.400,00	94,80	6.303.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	39.103.200,00	0,00	39.100.800,00	0,00	39.100.800,00	99,99	2.400,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	39.720.000,00	0,00	28.340.000,00	0,00	28.340.000,00	71,35	11.380.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.03	TOTAL KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	11.409.713.214,00	0,00	847.241.932,00	0,00	847.241.932,00	7,43	10.562.471.282,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.03.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	170.816.400,00	0,00	170.659.000,00	0,00	170.659.000,00	99,91	157.400,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.03.3	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	148.437.200,00	0,00	90.277.200,00	0,00	90.277.200,00	60,82	58.160.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.03.4	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	525.859.900,00	0,00	434.341.900,00	0,00	434.341.900,00	82,60	91.518.000,00
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.03.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	479.531.500,00	0,00	393.739.600,00	0,00	393.739.600,00	82,11	85.791.900,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.03.9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	218.933.900,00	0,00	215.910.900,00	0,00	215.910.900,00	98,62	3.023.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	91.799.000,00	0,00	91.799.000,00	0,00	91.799.000,00	100,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	175.126.000,00	0,00	122.106.000,00	0,00	122.106.000,00	69,72	53.020.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.04	TOTAL KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	1.810.503.900,00	0,00	1.518.833.600,00	0,00	1.518.833.600,00	83,89	291.670.300,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.04.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	352.478.477.200,00	0,00	58.277.980.200,00	0,00	58.277.980.200,00	16,53	294.200.497.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.000.000.000,00	0,00	2.955.988.000,00	0,00	2.955.988.000,00	98,53	44.012.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	3.847.718.636,00	0,00	3.819.607.036,00	0,00	3.819.607.036,00	99,27	28.111.600,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.05	TOTAL KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	359.326.195.836,00	0,00	65.053.575.236,00	0,00	65.053.575.236,00	18,10	294.272.620.600,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.05.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	239.466.400,00	0,00	201.082.400,00	0,00	201.082.400,00	83,97	38.384.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.05.3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	410.144.500,00	0,00	367.821.450,00	0,00	367.821.450,00	89,68	42.323.050,00
	Kabupaten/Kota							

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01	TOTAL PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	375.125.376.650,00	503.400.000,00	69.268.415.018,00	0,00	69.771.815.018,00	18,60	305.353.561.632,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01	TOTAL KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah	649.610.900,00	0,00	568.903.850,00	0,00	568.903.850,00	87,58	80.707.050,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01.1	Penyusunan Standar Harga	137.044.100,00	19.200.000,00	115.309.000,00	0,00	134.509.000,00	98,15	2.535.100,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	17.954.000,00	0,00	17.954.000,00	0,00	17.954.000,00	100,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	28.493.000,00	0,00	26.877.500,00	0,00	26.877.500,00	94,33	1.615.500,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	372.830.200,00	24.000.000,00	242.596.600,00	93.000.200,00	359.596.800,00	96,45	13.233.400,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	571.443.400,00	0,00	488.643.400,00	0,00	488.643.400,00	85,51	82.800.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	63.376.000,00	0,00	13.077.000,00	0,00	13.077.000,00	20,63	50.299.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	13.877.000,00	0,00	13.877.000,00	0,00	13.877.000,00	100,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	97.056.000,00	0,00	82.909.000,00	0,00	82.909.000,00	85,42	14.147.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 4.2.01	TOTAL PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.302.073.700,00	43.200.000,00	1.001.243.500,00	93.000.200,00	1.137.443.700,00	87,36	164.630.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 4.2.01	TOTAL KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.302.073.700,00	43.200.000,00	1.001.243.500,00	93.000.200,00	1.137.443.700,00	87,36	164.630.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 4.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 4.2.01.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	256.200.000,00	0,00	136.200.000,00	120.000.000,00	256.200.000,00	100,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 4.2.01.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	54.278.000,00	0,00	48.392.000,00	0,00	48.392.000,00	89,16	5.886.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 4.2.01.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	37.952.400,00	0,00	37.952.400,00	0,00	37.952.400,00	100,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 4.2.01.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penetapan Wajib Pajak Daerah	1.235.556.900,00	0,00	1.196.723.900,00	0,00	1.196.723.900,00	96,86	38.833.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 4.2.01.8	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	197.795.000,00	0,00	197.795.000,00	0,00	197.795.000,00	100,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 4.2.01.13		429.720.000,00	0,00	404.612.000,00	0,00	404.612.000,00	94,16	25.108.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01.0.0 . 4.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	123.995.600,00	0,00	122.403.800,00	0,00	122.403.800,00	98,72	1.591.800,00
Jumlah		396.943.013.335,00	4.810.598.788,00	74.806.654.287,00	569.600.200,00	80.186.853.275,00	20,20	316.756.160.060,00

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Penyusunan LKjiP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada Tahun 2023 yang dituangkan menjadi 2 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja utama Kepala BPKPD. LKjiP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Dalam pencapaian kinerja BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran belum dapat dicapai dengan baik, dan dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Laporan Kinerja BPKPD Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada dikategorikan **Sedang**. Kategori **Sedang** Tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2023 adalah hasil perhitungan yang menghasilkan angka rata-rata capaian sasaran sebesar **75,25 %**. Hasil yang telah dicapai di tahun 2023 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang.

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKiP yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara, antara lain Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan didalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara; Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKjiP; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara, dan dijadikan sebagai acuan untuk menjadi perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

1. Melakukan perbaikan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, salah satunya dengan berkonsultasi;
2. Masing-masing pelaksana kegiatan lebih cermat dalam mengisi capaian output kegiatan ke dalam sistem e-controlling dan e-controlling Kinerja, sehingga laporan yang tersusun benar-benar menggambarkan realisasi fisik dan kinerja suatu kegiatan;
3. Masing-masing bidang perlu melakukan pengawasan/pengendalian internal serta meningkatkan kapasitas SDM masing-masing guna LKjiP BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 mengawal capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

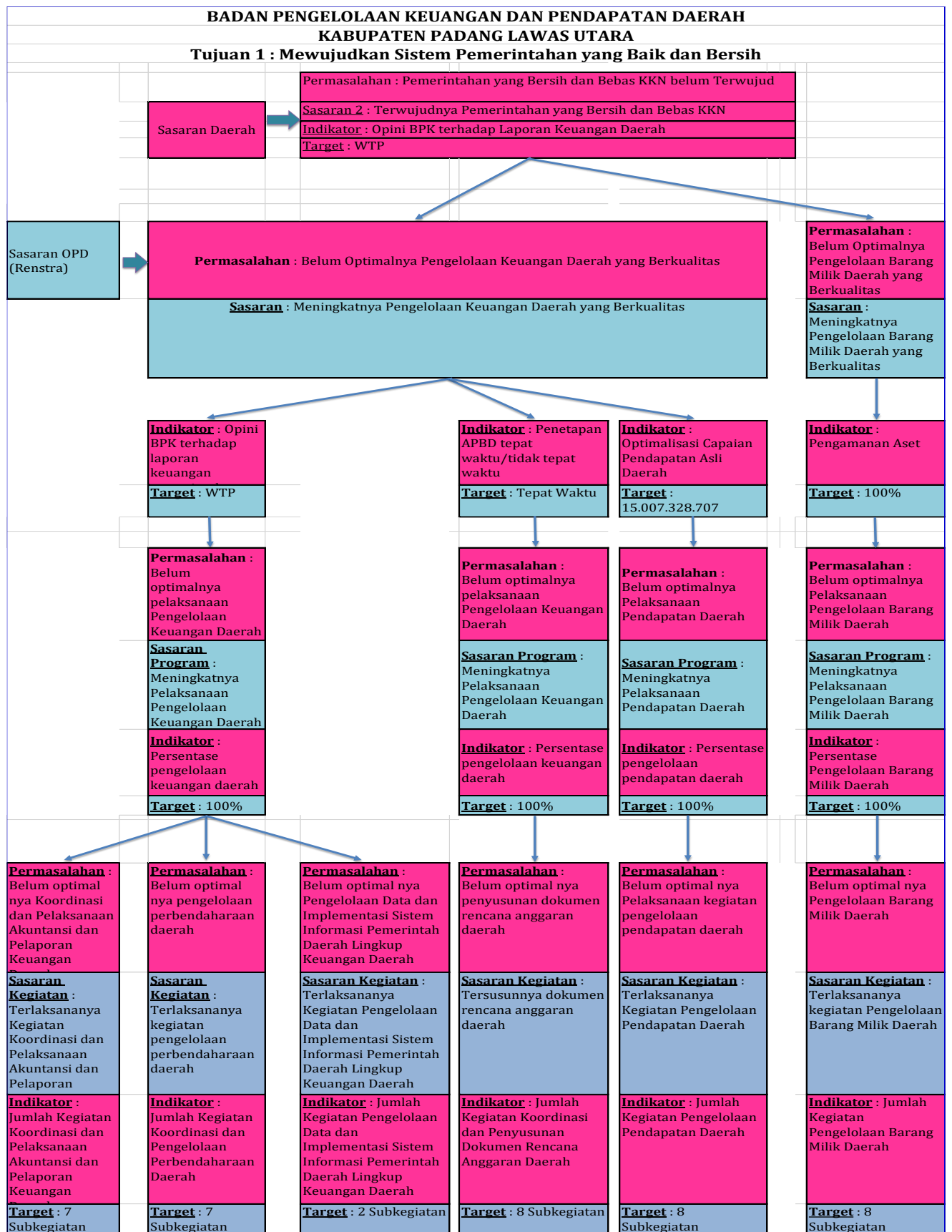
Gunungtua, 13 Maret 2024

KEPALA BADAN PKPD

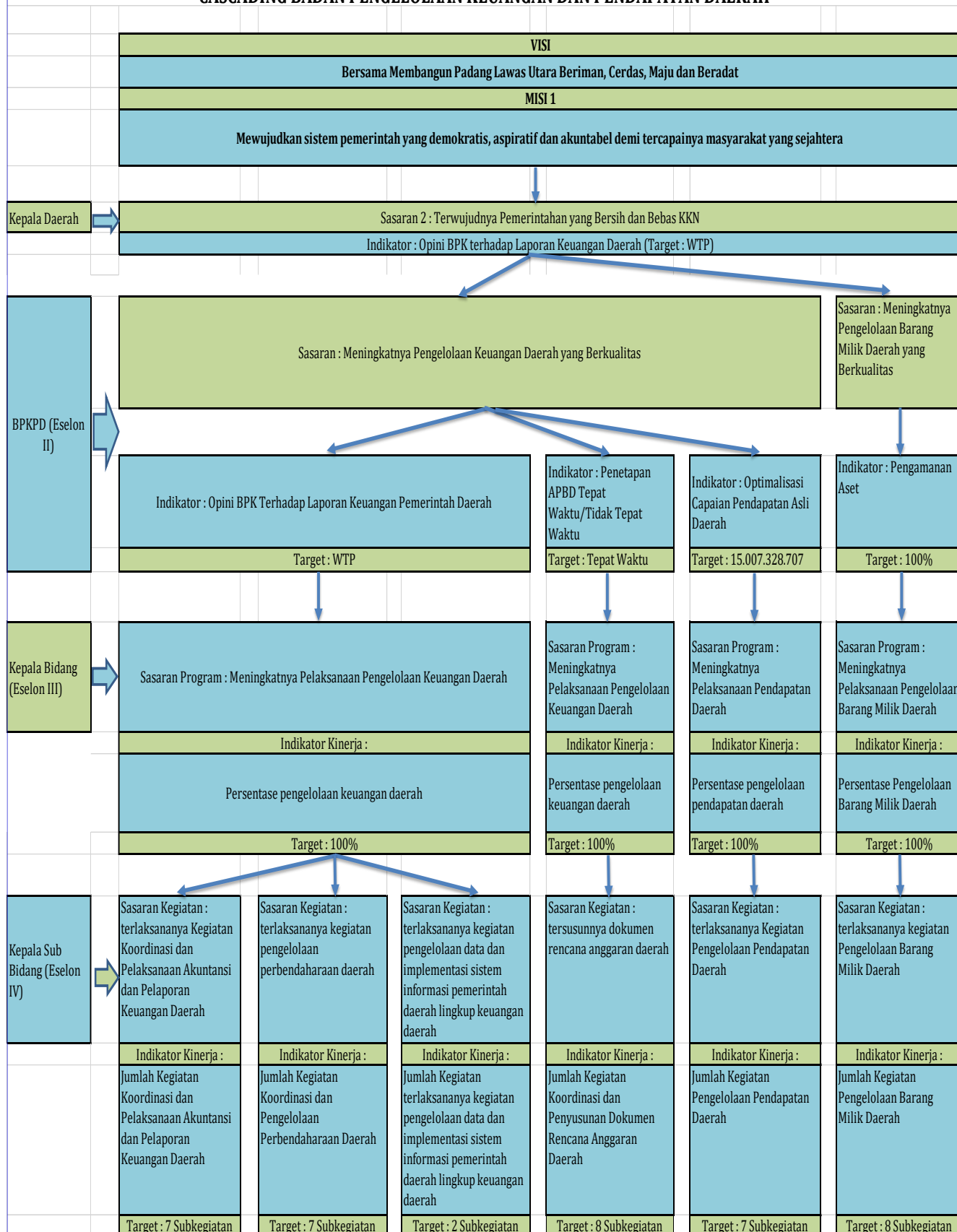


**BANGUN PARLAUNGAN, SE, MM
PEMBINA**

NIP. 19821201 200904 1 003



CASCADING BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Tercapainya peningkatan penerimaan PAD sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan	Tercapainya peningkatan penerimaan PAD sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan	Menerima dan mengumpulkan bahan dari responden berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk tindakan selanjutnya	Melaksanakan pemeriksaan tiket atau karcis sesuai register penomoran	3 dokumen	3 dokumen
2			Mengelompokkan bahan sesuai prosedur dan bahan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan perolehan data yang dibutuhkan	Melaksanakan porporasi tiket atau karcis	3 dokumen	3 dokumen
3			Mencatat perkembangan kegiatan dan permasalahan data yang terjadi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja	-	3 dokumen	-
4			Menerima dan meneliti kebenaran data berdasarkan bahan yang masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan yang akan diprioritaskan	-	3 dokumen	-
5			Mengolah dan menyajikan data sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai jenis penyelenggaraan dan permasalahanyang akan ditindak lanjut	-	3 dokumen	-
6			Menyiapkan konsep data sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan pembinaan	-	3 dokumen	-

Pihak Kedua,
KASUBID PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

FACHRUDDIN SIREGAR, SE
PENATA III/a
NIP. 19841029 201001 1 028

Gunungtua, November 2023

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI KARCIS

MUHAMMAD HABONARAN
PENATA MUDA III/a
NIP. 19740821 200312 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah.	Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah.	15.007.328.707	15.007.328.707
1	Meningkatnya Laporan Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Meningkatnya Laporan Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak	1 Laporan	1 Laporan

NO	SUBKEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Rp 49.282.000	Rp 54.278.000	APBD	P-APBD
	JUMLAH		Rp 49.282.000	Rp 54.278.000	APBD	P-APBD

Pihak Kedua,
KABID PENDAPATAN

SYAHRIAL ALA MEYAH PANJAITAN, SE, MM
PENATA TINGKAT III/d
NIP. 19851015 201001 1 018

Gunungtua, November 2023

Pihak Pertama,
KASUBID PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

FACHRUDDIN SIREGAR, SE
PENATA III/c
NIP. 19841029 201001 1 028

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGENDALIAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO	SARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	Penggunaan Aset	Penggunaan Aset	100%	100%
1	Meningkatnya Dokumen Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	Meningkatnya Dokumen Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Meningkatnya Laporan Pemertanachuan barang milik daerah	Meningkatnya Laporan Pemertanachuan barang milik daerah	Jumlah Laporan Pemertanachuan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemertanachuan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan
3	Meningkatnya Laporan Pengamanan barang milik daerah	Meningkatnya Laporan Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan
4	Meningkatnya Rekomendasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Meningkatnya Rekomendasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekomendasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekomendasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan
5	Meningkatnya Penyusunan laporan barang milik daerah	Meningkatnya Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Ditusun	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Ditusun	2 Laporan	2 Laporan

NO	SUBKEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	Rp. 27.693.000	Rp. 28.493.000	-	P-APBD
2	Pemertanachuan barang milik daerah	Pemertanachuan barang milik daerah	Rp. 195.540.000	Rp. 372.830.200	APBD	P-APBD
3	Pengamanan barang milik daerah	Pengamanan barang milik daerah	Rp. 574.189.900	Rp. 571.443.400	APBD	P-APBD
4	Rekomendasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Rekomendasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Rp. 13.077.000	Rp. 13.877.000	APBD	P-APBD
5	Penyusunan laporan barang milik daerah	Penyusunan laporan barang milik daerah	Rp. 98.183.800	Rp. 97.056.000	APBD	P-APBD
6	-	Penyusunan standar harga	-	Rp. 137.044.100	-	P-APBD
7	-	Penyusunan pemertanachuan barang milik daerah	-	Rp. 17.954.000	-	P-APBD
8	-	Optimalisasi penggunaan, pemertanachuan, pemertanachuan, dan penghapusan barang milik daerah	-	Rp. 63.376.000	-	P-APBD
	JUMLAH		Rp. 908.685.700	Rp. 1.502.073.700	APBD	P-APBD

Pihak Kedua,
KABUPATEN


DANIYEL HARAHAP, S.Eom
PEKATA TINGKAT I II/4
RIP. 19801020 200904 1 005

Gunungrejo, November 2023

Pihak Pertama,
KABUPATEN


IRA FARIA RAMBE, SE, MM
PEKATA TINGKAT I II/4
RIP. 19850817 200904 2 009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah	Tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah	Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	41 laporan	41 laporan
2			Membantu menyelenggarakan dan menghapus barang milik daerah	Mempelajari, menganalisis serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan klasifikasi barang dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	47 laporan	47 laporan
3			Membantu menyelenggarakan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah	Melaksanakan pengolahan data dengan cara mengklarifikasi data barang berdasarkan hasil pengumpulan data untuk di tindaklanjuti	41 laporan	41 laporan
4			Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas	Mengadakan penelitian berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit	47 laporan	47 laporan
5			Membantu menyiapkan rancangan pedoman pengelolaan barang milik daerah	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	41 laporan	41 laporan

Pihak Kedua,
**KASUBID PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BMD**



IRA FARISA RAMBE, SE, MM
PENATA TINGKAT I III/d
NIP. 19850817 200904 2 009

Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,

ANALIS KLASIFIKASI BARANG



HALIDA HARAHAHAP, SE
PENATA MUDA III/a
NIP. 19800312 201001 2 018

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah.	Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah.	15.007.328.707	15.007.328.707
1	Meningkatnya Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Meningkatnya Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Unit	12 Unit
2	Meningkatnya Dokumen wajib pajak daerah	Meningkatnya Dokumen wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	50 Dokumen	50 Dokumen

NO	SUBKEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Rp 225.600.000	Rp 256.200.000	APBD	P-APBD
2	Penetapan wajib pajak daerah	Penetapan wajib pajak daerah	Rp 174.520.000	Rp 197.795.000	APBD	P-APBD
	JUMLAH		Rp 400.120.000	Rp 453.995.000	APBD	P-APBD

Pihak Kedua,
KABID PENDAPATAN



SYAHRIL ADHAMSYAH PANJAITAN, SE, MM
PENATA TINGKAT I III/d
NIP. 19851015 201001 1 018

Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,

KASUBID PENETAPAN



MERILDA, S. Sp, MM
PENATA TINGKAT I III/d
NIP. 19840825 201001 2 033

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**


NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah.	Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah.	15.007.328.707	15.007.328.707
1	Meningkatnya Laporan Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Meningkatnya Laporan Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Laporan dan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan dan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan
2	Meningkatnya Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Meningkatnya Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Meningkatnya Laporan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Meningkatnya Laporan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan

NO	SUBKEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Rp 76.134.000	Rp 37.952.400	APBD	P-APBD
2	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Rp 375.190.000	Rp 429.720.000	APBD	P-APBD
3	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Rp 99.216.000	Rp 123.995.600	APBD	P-APBD
	JUMLAH		Rp 550.540.000	Rp 591.668.000	APBD	P-APBD

Pihak Kedua,
KABID PENDAPATAN


SYAHRIL ALAMSYAH PANJAITAN, SE, MM
PENATA TINGKAT I III/d
NIP. 19851015 201001 1 018

Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH


AZHARI SUTAN PARLINDUNGAN SIREGAR, SE
PENATA III/c
NIP. 19791213 201001 1 009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**


NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah.	Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah.	15.007.328.707	15.007.328.707
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan

NO	KEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 999.942.000	Rp 1.099.941.000	APBD	P-APBD
	JUMLAH		Rp 999.942.000	Rp 1.099.941.000	APBD	P-APBD

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN PKPD


BANGUN PARLAUNGAN SE, MM
PEMBINA IV/a
NIP. 19831201 200904 1 003

Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,
KABID PENDAPATAN


SYAHRIL ALAMSYAH PANJAITAN, SE, MM
PENATA TINGKAT I III/d
NIP. 19851015 201001 1 018

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BPKPD	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	7 Kegiatan	7 Kegiatan
2	Meningkatnya Dokumen Administrasi Keuangan BPKPD	Meningkatnya Dokumen Administrasi Keuangan BPKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan BPKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan BPKPD	3 Kegiatan	3 Kegiatan
3	Meningkatnya Dokumen Administrasi Kepegawaian BPKPD	Meningkatnya Dokumen Administrasi Kepegawaian BPKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian BPKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian BPKPD	2 Kegiatan	2 Kegiatan

NO	KEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 127.023.000	Rp 131.932.000	APBD	P-APBD
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 66.427.500	Rp 101.423.100	APBD	P-APBD
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 66.915.000	Rp 66.915.000	APBD	P-APBD
	JUMLAH		Rp 260.365.500	Rp 300.270.100	APBD	P-APBD

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN PKPD

BANGUN PARLAUNGAN, SE, MM
PEMBINA IV/a
NIP. 19831201 200904 1 003

Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,
SEKRETARIS BPKPD

MAHYUMI HARAHAP, SH
PEMBINA IV/a
NIP. 19700319 199103 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
1	Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	7 Kegiatan	7 Kegiatan
2	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan

NO	KEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 586.461.000	Rp 555.711.000	APBD	P-APBD
2	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rp 340.266.400	Rp 410.144.500	APBD	P-APBD
	JUMLAH		Rp 926.727.400	Rp 965.855.500	APBD	P-APBD

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN PKPD

BANGUN PARLAUNGAN SE, MM
PEMBINA IV/a
NIP. 19831201 200904 1 003

Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,
KABID PERBENDAHARAAN

PEFY SARIEL, ST, M.Si
PEMBINA IV/a
NIP. 19770919 200604 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu.	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu.	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU
1	Meningkatnya Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Meningkatnya Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	8 Kegiatan	8 Kegiatan

NO	KEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Rp 2.151.613.400	Rp 1.929.352.800	APBD	P-APBD
	JUMLAH		Rp 2.151.613.400	Rp 1.929.352.800	APBD	P-APBD

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN PKPD

BANGUN PARLAUNGAN SE, MM
PEMBINA IV/a
NIP. 19831201 200904 1 003

Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,
KABID ANGGARAN

ZULFIRMAN SIREGAR, S.Sos
PENATA TINGKAT I III/d
NIP. 19861025 201001 1 013

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah.	Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah.	15.007.328.707	15.007.328.707
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan

NO	KEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.155.631.900	Rp 1.235.556.900	APBD	P-APBD
	JUMLAH		Rp 1.155.631.900	Rp 1.235.556.900	APBD	P-APBD

Pihak Kedua,
KEPADA BADAN PKPD

BANGUN PARLAUNGAN SE, MM
PEMBINA IV/a
NIP. 19831201 200904 1 003

Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,
KABID PBB DAN BPHTB

INDRA STAHPUTRA, S.Kom
PENATA III/c
NIP. 19860918 201101 1 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang	Pengamanan Aset.	Pengamanan Aset.	100%	100%
1	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	8 Kegiatan	8 Kegiatan

NO	KEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.242.073.700	Rp 1.302.073.700	APBD	P-APBD
	JUMLAH		Rp 1.242.073.700	Rp 1.302.073.700	APBD	P-APBD

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN PKPD

BANGUN PARLAUNGAN SE, MM
PEMBINA IV/a
NIP. 19831201 200904 1 003

Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,
KABID ASET

DANIYEL HARAHAP, S.Kom
PENATA TINGKAT I III/d
NIP. 19801020 200904 1 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..	WTP	WTP
1	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	7 Kegiatan	7 Kegiatan
2	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan

NO	KEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 1.659.703.900	Rp 1.810.503.900	APBD	P-APBD
2	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rp 410.144.500	Rp 239.466.400	APBD	P-APBD
	JUMLAH		Rp 2.069.848.400	Rp 2.049.970.300	APBD	P-APBD

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN PKPD

BANGUN PARLAUNGAN SE, MM
PEMBA IV/a
NIP. 19831201 200904 1 003

Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,
KASID AKUNTANSI DAN PELAPORAN

ROMY AKBAR SIALINGING, ST, MM
PENATA TINGKAT I III/d
NIP. 19830610 201001 1 030

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Tersedianya pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Tersedianya pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Penginputan data di bidang laporan keuangan	Penginputan data di bidang laporan keuangan	47 laporan	47 laporan
2			penyediaan bahan kegiatan dan penyusunan data laporan keuangan	penyediaan bahan kegiatan dan penyusunan data laporan keuangan	47 laporan	47 laporan
3			Pengelolaan data rekomendasi di bidang laporan keuangan	Pengelolaan data rekomendasi di bidang laporan keuangan	47 laporan	47 laporan
4			Penyusunan kegiatan pengumpulan data laporan keuangan	Penyusunan kegiatan pengumpulan data laporan keuangan	47 laporan	47 laporan
5			Laporan hasil kegiatan kepada atasan	Laporan hasil kegiatan kepada atasan	47 laporan	47 laporan
6			Penyediaan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas	Penyediaan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas	47 laporan	47 laporan

Pihak Kedua,
KASUBBID PELAPORAN KEUANGAN

ESMAWATI SEMBIRING, SH
PENATA TINGKAT I III/d
NIP. 19760306 200212 2 004

Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,
ANALIS LAPORAN KEUANGAN

LUKMAN HAKIM HARAHAP, SE
PENATA MUDA III/a
NIP. 199002 16 202012 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	WTP	WTP
1	Meningkatnya laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	Meningkatnya laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan
2	Meningkatnya Dokumen Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Meningkatnya Dokumen Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Meningkatnya Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Meningkatnya Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	41 Orang

NO	SUBREGLITAN		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	Rp 525.859.900	Rp 525.859.900	APBD	P-APBD
2	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Rp 16.599.000	Rp 91.799.000	APBD	P-APBD
3	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Rp 175.126.000	Rp 175.126.000	APBD	P-APBD
	JUMLAH		Rp 717.584.900	Rp 792.784.900	APBD	P-APBD

Phak Renda,
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

ROMY AKMALIYAH, ST, MM
PENATA TINGKAT I III/d
NIP. 19830610 201001 1 030

Gurungtua, November 2023
Phak Perdana,
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

ESMAWATI SEMBING, SH
PENATA TINGKAT I III/4
NIP. 19760306 200212 2 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	7 Dokumen	7 Dokumen
1	Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen
2	Meningkatnya penyusunan dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Program dan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Program dan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Meningkatnya penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Program dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Program dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
4	Meningkatnya penyusunan DPA-SKPD	Meningkatnya penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Program dan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Program dan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
5	Meningkatnya penyusunan perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Program dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Program dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
6	Meningkatnya penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Program dan Dokumen Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Program dan Dokumen Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan
7	Meningkatnya evaluasi kinerja perangkat daerah	Meningkatnya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan
NO	SUBREGLITAN		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Sublegitansi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Sublegitansi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp 28.194.000	Rp 33.105.000	APBD	P-APBD
2	Sublegitansi koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Sublegitansi koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Rp 14.127.000	Rp 14.127.000	APBD	P-APBD
3	Sublegitansi koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Sublegitansi koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Rp 14.127.000	Rp 14.127.000	APBD	P-APBD
4	Sublegitansi koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Sublegitansi koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Rp 14.127.000	Rp 14.127.000	APBD	P-APBD
5	Sublegitansi koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Sublegitansi koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Rp 14.127.000	Rp 14.127.000	APBD	P-APBD
6	Sublegitansi koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Sublegitansi koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Rp 28.154.000	Rp 28.154.000	APBD	P-APBD
7	Sublegitansi evaluasi kinerja perangkat daerah	Sublegitansi evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 14.127.000	Rp 14.127.000	APBD	P-APBD
	JUMLAH		Rp 127.023.000	Rp 123.932.000	APBD	P-APBD

Phak Renda,
SEKRETARI SKPD

MARTULAN BAKHAP, SH
PENATA IV/a
NIP. 19750315 199503 1 003

Gurungtua, November 2023
Phak Perdana,
SEKRETAR

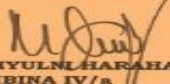
BOVEDA ROLLANITA SITOMPUL, SH, NIP
PENATA III/a
NIP. 19860304 201101 2 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	Meningkatnya Dokumen Administrasi Kepegawaian BPKPD	Meningkatnya Dokumen Administrasi Kepegawaian BPKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian BPKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian BPKPD	2 Kegiatan	2 Kegiatan
1	Meningkatnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	SUBKEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Subkegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Subkegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Rp 33.457.500	Rp 33.457.500	APBD	P-APBD
2	Subkegiatan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Subkegiatan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Rp 33.457.500	Rp 33.457.500	APBD	P-APBD
	JUMLAH		Rp 66.915.000	Rp 66.915.000	APBD	P-APBD

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BPKPD


MAHYULN HARAHAP, SH
PEMBINA IV/a
NIP. 19700319 199103 1 003


Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


JULIATI NASUTION, SE
PENATA III/c
NIP. 19750708 201001 2 010

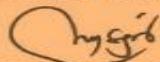
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Tercapainya penerimaan PBBP2 dan BPHTB sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan	Meningkatnya Dokumen Administrasi Kepegawaian BPKPD	Melakukan penyiapan bahan data PBBP2 untuk proses pengolahan data elektronik	Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah sesuai ketentuan agar tertib administrasi	6350 lembar	2 surat
2			Melakukan penyusunan SPPT, STTS, DHKP yang telah tercetak	Mengamankan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang	6350 lembar	20 data
3			Melakukan verifikasi data pendaftaran atau pemutakhiran objek PBBP2 dan BPHTB	Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi	1000 lembar	8 data
4			Melakukan penyusunan laporan dibidang PBBP2 dan BPHTB	Menyiapkan surat permintaan dan penyerahan barang berdasarkan nota permintaan barang sesuai ketentuan agar tertib administrasi	1 laporan	10 dokumen
5			Melaksanakan tugas lainnya sesuai yang diberikan atasan	Menyusun laporan barang sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib penatausahaan barang milik daerah	12 kali	15 laporan
6				Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya	-	10 laporan

Pihak Kedua,
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


JULIATI NASUTION, SE
PENATA III/c
NIP. 19750708 201001 2 010

Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA


PARDAMEAN, A.Md.Par
PENGATUR TINGKAT I II/d
NIP. 19841022 201505 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAMAS UTARA

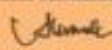
NO	SARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SEKUTUHA	SEBELUM	SEKUTUHA	SEBELUM	SEKUTUHA
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkelanjutan	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkelanjutan	Open RPS Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Open RPS Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTF	WTF
1	Meningkatnya Dokumen Perjanjian, pelaksanaan pengendalian dan pemantauan anggaran kas dan APBD	Meningkatnya Dokumen Perjanjian, pelaksanaan pengendalian dan pemantauan anggaran kas dan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pemantauan Anggaran Kas dan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pemantauan Anggaran Kas dan APBD	41 Dokumen	41 Dokumen
2	Meningkatnya Dokumen Fasilitas, Asistensi, Bimbingan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Meningkatnya Dokumen Fasilitas, Asistensi, Bimbingan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Bimbingan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Bimbingan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen
3	Meningkatnya dokumen realisasi pemantauan dan pengelompokan kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemantauan/pemantauan dan penyusunan perhitungan fluktuasi (PFG)	Meningkatnya dokumen realisasi pemantauan dan pengelompokan kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemantauan/pemantauan dan penyusunan perhitungan fluktuasi (PFG)	Jumlah Laporan Realisasi Pemantauan dan Pengelompokan Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemantauan/Pemantauan dan Penyusunan Perhitungan Fluktuasi (PFG)	Jumlah Laporan Realisasi Pemantauan dan Pengelompokan Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemantauan/Pemantauan dan Penyusunan Perhitungan Fluktuasi (PFG)	41 Laporan	41 Laporan
4	Meningkatnya Laporan Rekonstruksi data pemantauan dan pengelompokan kas serta pemantauan dan pemantauan atas APBD dengan sistem terkait	Meningkatnya Laporan Rekonstruksi data pemantauan dan pengelompokan kas serta pemantauan dan pemantauan atas APBD dengan sistem terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonstruksi Data Pemantauan dan Pengelompokan Kas serta Pemantauan dan Pemantauan atas APBD dengan sistem terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonstruksi Data Pemantauan dan Pengelompokan Kas serta Pemantauan dan Pemantauan atas APBD dengan sistem terkait	12 Dokumen	12 Dokumen

NO	SUKSES KINERJA		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SEKUTUHA	SEBELUM	SEKUTUHA	SEBELUM	SEKUTUHA
1	Perjanjian, pelaksanaan pengendalian dan pemantauan anggaran kas dan APBD	Perjanjian, pelaksanaan pengendalian dan pemantauan anggaran kas dan APBD	Rp. 19.400.000	Rp. 19.400.000	APBD	F-APBD
2	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Bimbingan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Bimbingan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp. 50.625.000	Rp. 50.625.000	APBD	F-APBD
3	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi pemantauan dan pengelompokan kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemantauan/pemantauan dan penyusunan perhitungan fluktuasi (PFG)	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi pemantauan dan pengelompokan kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemantauan/pemantauan dan penyusunan perhitungan fluktuasi (PFG)	Rp. 121.125.400	Rp. 121.125.400	APBD	F-APBD
4	Rekonstruksi data pemantauan dan pengelompokan kas serta pemantauan dan pemantauan atas APBD dengan sistem terkait	Rekonstruksi data pemantauan dan pengelompokan kas serta pemantauan dan pemantauan atas APBD dengan sistem terkait	Rp. 39.103.200	Rp. 39.103.200	APBD	F-APBD
	Jumlah		Rp. 230.254.600	Rp. 230.254.600	APBD	F-APBD

Fluktuasi, KASER PERUBAHAN


FERRY SARAJI, ST, M.Si
PERUSAHA IV/1
NIP. 19770919 200604 2 001

Dimasukkan, November 2023
 Fluktuasi, KASER PERUBAHAN


AHMAD MURYADI KASITUN, SE
PERUSAHA TIGERAT 1/05/4
NIP. 19790531 200604 1 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	WTP	WTP
1	Meningkatnya Dokumen pengelolaan kas daerah	Meningkatnya Dokumen pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Meningkatnya dokumen pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Meningkatnya dokumen pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Meningkatnya dokumen Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Meningkatnya dokumen Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	SUBKEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Rp 265.860.000	Rp 265.860.000	APBD	P-APBD
2	Koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Rp 50.626.400	Rp 19.876.400	APBD	P-APBD
3	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Rp 39.720.000	Rp 39.720.000	APBD	P-APBD
	JUMLAH		Rp 356.206.400	Rp 325.456.400	APBD	P-APBD

Pihak Kedua,
KABID PERBENDAHARAAN

PEPT SARAH, ST, M.Si
PENATA IV/c
NIP. 19770919 200604 2 001

Gunungtua, November 2023

Pihak Pertama,
KASUBID VERIFIKASI

RAHMAWATI HARAHAP, SH
PENATA TINGKAT I III/4
NIP. 19760409 199803 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah.	Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah.	15.007.328.707	15.007.328.707
1	Meningkatnya Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Meningkatnya Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJO P nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJO P nya	12 Obyek Pajak	12 Obyek Pajak

NO	SUBKEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Rp 1.155.631.900	Rp 1.235.556.900	APBD	P-APBD
	JUMLAH		Rp 1.155.631.900	Rp 1.235.556.900	APBD	P-APBD

Pihak Kedua,
KABID PBB DAN BPHTB

INDRA SYAHPUTRA, S.Kom
PENATA III/c
NIP. 19860918 201101 1 005

Gunungtua, November 2023

Pihak Pertama,
KASUBID PENDATAAN DAN
PENETAPAN PBB DAN BPHTB


SUSTRISNARRITA, S.Sos
PENATA TINGKAT I III/4
NIP. 19760126 201001 2 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

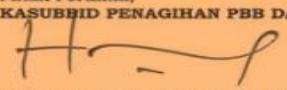
NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah.	Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah.	15.007.328.707	15.007.328.707
1	Meningkatnya Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Meningkatnya Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	12 Obyek Pajak	12 Obyek Pajak

NO	SUBKEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Rp 1.155.631.900	Rp 1.235.556.900	APBD	P-APBD
	JUMLAH		Rp 1.155.631.900	Rp 1.235.556.900	APBD	P-APBD

Pihak Kedua,
KABID PBB DAN BPHTB


INDRA SYAHPUTRA, S.Kom
PENATA III/c
NIP. 19860918 201101 1 005


Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,
KASUBID PENAGIHAN PBB DAN BPHTB


HOTMANAHAN PULUNGAN, S.Sos
PENATA TINGKAT I III/d
NIP. 19831208 201001 1 022


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Tersedianya dokumen penyusunan rencana anggaran daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Penginputan data dibidang laporan keuangan	Menerima dan memeriksa bahan dan data rencana kerja anggaran sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran	47 laporan	30 dokumen
2			Penyediaan bahan kegiatan dan penyusunan data laporan keuangan	Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data rencana kerja anggaran	47 laporan	35 dokumen
3			Pengelolaan data rekomendasi dibidang laporan keuangan	Menyusun konsep penyusunan rencana kerja anggaran	47 laporan	24 dokumen
4			Penyusunan kegiatan pengumpulan data laporan keuangan	Mendiskusikan dan mengevaluasi rencana kerja anggaran	47 laporan	30 laporan
5			Laporan hasil kegiatan kepada atasan	-	47 laporan	-
6			Penyediaan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas	-	47 laporan	-

Pihak Kedua,
SUB DIDANG ANGGARAN 1


SU'AIBAH ASH HASIBUAN, SE
PENATA TINGKAT I III/d
NIP. 19841201 200904 2 006

Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,
ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN


AHMAD ARDI, S.Kom
PENATA MUDA III/a
NIP. 19860829 202012 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu.	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu.	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU
1	Meningkatnya Dokumen Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan APBD	Meningkatnya Dokumen Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Meningkatnya Dokumen Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan Perubahan APBD	Meningkatnya Dokumen Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Meningkatnya Dokumen Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan Perubahan APBD	Meningkatnya Dokumen Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen
4	-	Meningkatnya Dokumen Penyusunan dan Verifikasi RKD - RKPD	-	Jumlah Dokumen RKD - RKPD yang Diverifikasi	-	1 Dokumen
5	-	Meningkatnya Dokumen Penyusunan dan Verifikasi RKD - RKPD	-	Jumlah Dokumen RKD - RKPD yang Diverifikasi	-	1 Dokumen

NO	SUBKEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan Perubahan APBD	Rp. 947.617.600	Rp. 834.346.600	APBD	P-APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan Perubahan APBD	Rp. 413.175.000	Rp. 441.278.000	APBD	P-APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan Perubahan APBD	Rp. 175.495.000	Rp. 175.495.000	APBD	P-APBD
4	-	Koordinasi dan Penyusunan dan Verifikasi RKD - RKPD	-	Rp. 60.330.000	APBD	P-APBD
5	-	Koordinasi dan Penyusunan dan Verifikasi RKD - RKPD	-	Rp. 60.330.000	APBD	P-APBD
	JUMLAH		Rp. 1.536.487.600	Rp. 1.571.679.600	APBD	P-APBD

Pihak Kedua,
KABID ANGGARAN

SULFIRMAN SIREGAR, S. Sos
PEMBINA TINGKAT I III/d
NIP. 19861028 201001 1 013

Gunungtau, November 2023
Pihak Pertama,
KASUBBID ANGGARAN 2

ABDUL KADIR NAGIAN, SE
PEKATA BINA TINGKAT I III/d
NIP. 19841101 201001 1 010


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu.	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu.	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU
1	Meningkatnya Dokumen penyusunan KUA dan PPAS	Meningkatnya Dokumen penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Meningkatnya penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Meningkatnya penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Meningkatnya pembinaan perencanaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota	Meningkatnya pembinaan perencanaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	41 Orang

NO	SUBKEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Subkegiatan koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Subkegiatan koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Rp. 133.701.500	Rp. 130.491.500	APBD	P-APBD
2	Subkegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Subkegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Rp. 129.021.500	Rp. 142.461.500	APBD	P-APBD
3	Subkegiatan pembinaan perencanaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota	Subkegiatan pembinaan perencanaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota	Rp. 227.062.600	Rp. 84.720.000	APBD	P-APBD
	JUMLAH		Rp. 489.785.600	Rp. 357.673.000	APBD	P-APBD

Pihak Kedua,
KABID ANGGARAN

SULFIRMAN SIREGAR, S. Sos
PEMBINA TINGKAT I III/d

Gunungtau, November 2023
Pihak Pertama,
KASUBBID ANGGARAN 1

SUA'TBAH ASH HASIBUAN, SE
PEMBINA TINGKAT I III/d

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAMUK UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkeadilan	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkeadilan	Optimal BPP, Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Optimal BPP, Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
1	Meningkatnya Laporan Pelaksanaan Anggaran, Perencanaan dan Pengendalian Keuangan	Meningkatnya Laporan Pelaksanaan Anggaran, Perencanaan dan Pengendalian Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Kajian Pelaksanaan Anggaran, Perencanaan dan Pengendalian Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Kajian Pelaksanaan Anggaran, Perencanaan dan Pengendalian Keuangan	1 Laporan	1 Laporan
2	Meningkatnya Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Kabupaten, Triwulanan dan Semesteran	Meningkatnya Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Kabupaten, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Kabupaten, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Kabupaten, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	2 Laporan
3	Meningkatnya Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian APBD Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Kelurahan/Kelurahan	Meningkatnya Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian APBD Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Kelurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian APBD Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Kelurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian APBD Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Kelurahan/Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	RUMUSKAYAN		ANGKARAN		REVISI/ANALISIS	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	APBD	P-APBD
2	Meningkatnya dan pengendalian laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD Kabupaten, Triwulanan dan Semesteran	Meningkatnya dan pengendalian laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD Kabupaten, Triwulanan dan Semesteran	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	APBD	P-APBD
3	Meningkatnya dan pengendalian dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian APBD Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Kelurahan/Kelurahan	Meningkatnya dan pengendalian dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian APBD Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Kelurahan/Kelurahan	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	APBD	P-APBD
JUMLAH			Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000	APBD	P-APBD

Pada Tanggal, **KABUPATEN PADANG LAMUK UTARA**

**HASYDA SINAGA, SE
PENATA TINGKAT I III/4
NIP. 19780210 199903 2 001**

Gunungtua, November 2023
ANALIS KEBIJAKAN

**WAHDY ANDIKA, SE
PENATA TINGKAT I III/4
NIP. 19941123 202203 1 003**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya Dokumen Administrasi Kepegawaian BPKPD	Meningkatnya Dokumen Administrasi Keuangan BPKPD	Penginputan data dibidang laporan keuangan	Penginputan data dibidang laporan keuangan	47 laporan	47 laporan
2			Penyediaan bahan kegiatan dan penyusunan data laporan keuangan	Penyediaan bahan kegiatan dan penyusunan data laporan keuangan	47 laporan	47 laporan
3			Pengelolaan data rekomendasi dibidang laporan keuangan	Pengelolaan data rekomendasi dibidang laporan keuangan	47 laporan	47 laporan
4			Penyusunan kegiatan pengumpulan data laporan keuangan	Penyusunan kegiatan pengumpulan data laporan keuangan	47 laporan	47 laporan
5			Laporan hasil kegiatan kepada atasan	Laporan hasil kegiatan kepada atasan	47 laporan	47 laporan
6			Penyediaan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas	Penyediaan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas	47 laporan	47 laporan

Pihak Kedua,
ANALIS KEBIJAKAN

**HASYDA SINAGA, SE
PENATA TINGKAT I III/4
NIP. 19780210 199903 2 001**

Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,
**ANALIS APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA
SISTEM KEUANGAN**

**WAHDY ANDIKA, SE
PENATA TINGKAT I III/4
NIP. 19941123 202203 1 003**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Mengelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyerahan atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya dengan menggunakan kas umum	Mengelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyerahan atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya dengan menggunakan kas umum	1 dokumen	1 dokumen
2			Mengelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyerahan atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya dengan menggunakan buku pembantu per rinci objek penerimaan	Mengelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyerahan atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya dengan menggunakan buku pembantu per rinci objek penerimaan	1 dokumen	1 dokumen
3			Mengelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyerahan atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya dengan menggunakan buku rekapitulasi penerimaan harian	Mengelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyerahan atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya dengan menggunakan buku rekapitulasi penerimaan harian	1 dokumen	1 dokumen
4			Membuat pertanggungjawaban secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kasir pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Membuat pertanggungjawaban secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kasir pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	1 dokumen	1 dokumen
5			Membuat pertanggungjawaban secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Membuat pertanggungjawaban secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	1 dokumen	1 dokumen

Pihak Kedua,
ANALIS KEBERJAKAN

HASRIDA SINAGA, SE
PENATA TINGKAT I III/d
NIP. 19780210 199903 2 001

Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,
BENDAHARA PENERIMA

ANDIKA, SE
PENATA MUDA II/a
NIP. 19880703 201101 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	1 dokumen	1 dokumen
2			Mengurus surat perintah membayar uang SPM berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang	Mengurus surat perintah membayar uang SPM berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang	3 dokumen	3 dokumen
3			Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas	20 skpd	20 skpd
4			Melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas	20 skpd	20 skpd
5			Mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang didalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan	Mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang didalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan	20 skpd	20 skpd

Pihak Kedua,
ANALIS KEBERJAKAN

HASRIDA SINAGA, SE
PENATA TINGKAT I III/d
NIP. 19780210 199903 2 001

Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,
BENDAHARA PENGELUARAN

NURHASANA SIREGAR
PENGATUR TINGKAT I II/d
NIP. 19880903 201001 2 014

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LATAS UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	Meningkatnya Dokumen Administrasi Keuangan BPKPD	Meningkatnya Dokumen Administrasi Keuangan BPKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan BPKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan BPKPD	3 Kegiatan	3 Kegiatan
1	Meningkatnya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Meningkatnya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Meningkatnya penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Meningkatnya penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan
3	Meningkatnya penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Meningkatnya penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan

NO	SUBKEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Subkegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Subkegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Rp 22.657.500	Rp 57.653.100	APBD	P-APBD
2	Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp 20.808.000	Rp 20.808.000	APBD	P-APBD
3	Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Rp 22.962.000	Rp 22.962.000	APBD	P-APBD
	JUMLAH		Rp 66.427.500	Rp 101.423.100	APBD	P-APBD

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BPKPD

MARYULO HARASAP, SE
PENATA TINGKAT IV/a
NIP. 19700319 199103 2 003

Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN

HASRIDA SINAGA, SE
PENATA TINGKAT I III/4
NIP. 19780210 199903 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Menyiapkan bahan urusan surat menyurat, penggandaan dan data kearsipan	Mengolah dan menyajikan data	5 berkas	5 berkas
2			Menyiapkan rencana anggaran rutin dan anggaran operasional tata usaha	Mengolah, memelihara, menyajikan dan mengembangkan data base daan informasi keuangan	1 berkas	1 berkas
3			Pengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai	Mengumpulkan laporan keuangan	4 berkas	4 berkas
4			Menganalisa kebutuhan/kegiatan yang menyangkut tata usaha	Menyusun data realisasi belanja	5 dokumen	5 dokumen
5			Mengkoordinasikan dengan bidang tentang persiapan pemeliharaan perlengkapan operasional	Menyusun laporan realisasi anggaran	4 berkas	4 berkas
6			Membantu memverifikasi sub koordinator keuangan	Menyusun rekapitulasi pajak	3 berkas	3 berkas
7			Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Penyelesaian dokumen pertanggungjawaban belanja (SPJ)	2 dokumen	2 dokumen

Pihak Kedua,
ANALIS KEBIJAKAN

HASRIDA SINAGA, SE
PENATA TINGKAT I III/4
NIP. 19780210 199903 2 001

Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI KEUANGAN

MARIA HUSNI SIREGAR
PENGATUR II/c
NIP. 19810725 200901 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	WTP	WTP
1	Meningkatnya Penyusunan Dokumen kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Meningkatnya Penyusunan Dokumen kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Meningkatnya Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Meningkatnya Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	41 Orang

NO	SUBKEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Rp 172.717.900	Rp 218.933.900	APBD	P-APBD
2	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Rp 410.144.500	Rp 410.144.500	APBD	P-APBD
	JUMLAH		Rp 582.862.400	Rp 629.078.400	APBD	P-APBD

Pihak Kedua,
KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN

ROMY AKBAR SIALINGING, ST, MM
PENATA TINGKAT I III/d
NIP. 19830610 201001 1 030

Gunungtua, November 2023

Pihak Pertama,
KASUBID PEMBINAAN TEKNIK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

SUWANDI, SE
PENATA III/c
NIP. 19850515 200904 1 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	-	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	Menyiapkan dan melakukan analisa terhadap bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	-	10 dokumen
2	-	-	-	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pajak Daerah	-	15 surat
3	-	-	-	Melakukan analisa terhadap permasalahan di bidang Pajak	-	10 dokumen
4	-	-	-	Menyiapkan bahan dan mengumpulkan laporan data realisasi pajak	-	4 dokumen
5	-	-	-	Melakukan penelaahan terhadap data realisasi pajak dan retribusi daerah	-	4 dokumen
6	-	-	-	Membuat pemetaan untuk survey atau pemasangan alat rekam Pajak Daerah	-	26 dokumen

Pihak Kedua,
KASUBID PENETAPAN

MERILDA, S. S⁴, MM
PENATA TINGKAT I III/d
NIP. 19840825 201001 2 033

Gunungtua, November 2023

Pihak Pertama,
ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DAIMAN, S. Ag
PEMBINA TINGKAT I IV/b
NIP. 19660225 198803 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	-	Meningkatnya Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	Mengumpulkan bahan/dokumen dalam penyusunan rekomendasi realisasi anggaran	-	10 dokumen
2			-	Mengklasifikasikan dokumen dalam rangka pelaporan realisasi anggaran	-	15 surat
3			-	Menelaah/meneliti dan menyimpulkan dokumen sebagai bahan pelaporan realisasi anggaran	-	10 dokumen
4			-	Menyusun rekomendasi sebagai bahan pelaporan realisasi anggaran	-	4 dokumen

Pihak Kedua,
SUB BIDANG ANGGARAN 2


ABDUL RASYID SIDIQIAN, SE
PENATA MUDA TINGKAT I III/b
NIP. 19841101 201001 1 010

Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,
ANALIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN


Drs. MAHMUDIN HARAHAP, MM
PEMBINA TINGKAT I IV/b
NIP. 19660209 199303 1 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	-	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran APBD	-	Mengumpulkan bahan/dokumen dalam penyusunan rekomendasi yang berkaitan dengan anggaran	-	10 dokumen
2			-	Mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menyimpulkan dokumen sebagai bahan pelaporan realisasi anggaran	-	15 dokumen
3			-	Mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menyimpulkan dokumen sebagai bahan pelaporan realisasi anggaran	-	10 dokumen
4			-	Mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menyimpulkan dokumen sebagai bahan pelaporan realisasi anggaran	-	4 dokumen
5			-	Mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menyimpulkan dokumen sebagai bahan pelaporan realisasi anggaran	-	4 dokumen
6			-	Mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menyimpulkan dokumen sebagai bahan pelaporan realisasi anggaran	-	2 dokumen
7			-	Mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menyimpulkan dokumen sebagai bahan pelaporan realisasi anggaran	-	4 dokumen
8			-	Mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menyimpulkan dokumen sebagai bahan pelaporan realisasi anggaran	-	10 dokumen

Pihak Kedua,
PERENCANA


NURHIDAYAH SITOMPUL, SK, SE
PENATA III/c
NIP. 19860804 201101 2 007

Gunungtua, November 2023
Pihak Pertama,
ANALIS LAPORAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAKSANA


MARDIANA LIRISA, SP
PENATA TINGKAT I IV/b
NIP. 19860804 201101 2 007